

# ADAPTASI KEBIASAAN BARU **DI KANTOR**



Guna menekan munculnya kluster perkantoran, perlu bersama tertib  
**#PakaiMasker #JagaJarak #CuciTanganPakaiSabun**  
 Lakukan panduan kesehatan sejak berangkat dari rumah, saat bekerja,  
 istirahat makan siang, hingga kembali ke rumah.



NEWSLETTER

# infoHUBDAT

Berpikir Jernih Membangun Transportasi Darat

EDISI TRIWULAN 04 / 2020

## NAIK BUS BERSAMA TEMAN BUS

Program *Buy The Service*  
 untuk Konektivitas Perkotaan



**Menhub Evaluasi  
Angkutan Nataru  
2020/2021**



**Random check** ini merupakan pesan bahwa dalam masa pandemi ini kita harus berhati-hati. Upaya melakukan **random check** ini sangat penting agar mereka yang merasa kurang enak badan, tidak berangkat.

**Budi Karya Sumadi**  
Menteri Perhubungan Republik Indonesia



Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau pelaksanaan *random check Rapid Test Antigen* di Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta (23/12/2020). Foto: HMS DJPD/ABA

## BERSEPEDA SEHAT DAN SELAMAT DI TENGAH PANDEMI



Sepeda belakangan ini menjadi tren moda transportasi – non motor, untuk berbagai kegiatan, ke kantor (bekerja), di kawasan tertentu (*city-block*), dan juga berolahraga yang aman dan nyaman di era Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), saat wabah virus corona masih melanda negeri ini. Maraknya pesepeda berlalu-lintas di jalan raya umum, baik di hari libur maupun hari kerja, untuk mencegah dampak negatifnya, seperti meningkatnya kasus kecelakaan, Kementerian Perhubungan mengantisipasi dampak negatif bersepeda dengan menggulirkan peraturan-perundangan bagi pesepeda. Salah satunya dengan dirilisnya Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan. Aturan ini dibuat untuk mewujudkan tertib berlalu lintas dan menjamin keselamatan penggunaan sepeda di jalan, mengingat semakin maraknya penggunaan sepeda akhir-akhir ini.

Menyikapi hal tersebut, Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Direktorat Sarana Transportasi Jalan menyelenggarakan Sosialisasi Keselamatan Bersepeda sekaligus sosialisasi disiplin 3M (Mencuci Tangan, Memakai Masker dan Menjaga Jarak). Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jum'at, 20 Oktober 2020 berlokasi di Pelataran Masjid Cut Mutia dan Taman Menteng Jakarta Pusat.

Adapun rangkaian Kegiatan Sosialisasi Bersepeda PM No 59 Tahun 2020 diantaranya *gowes rally*; kampanye keselamatan bersepeda menggunakan *sandiwich man*, rompi, *bike tag* dll; *social responsibility* (Pemberian Helm, Lampu Sepeda Depan dan Belakang, Pembagian *healthy kit* berupa masker dan *hand sanitizer*). (\*)



Ditjen Perhubungan Darat



ditjen\_hubdat



hubdat151



Hubdat.dephub.go.id



151



Assalamualaikum Wr.Wb.

Apa kabar pembaca setia *Newsletter* infoHUBDAT yang budiman? Di tengah masa pandemi ini, kita bersua kembali melalui edisi keempat *Newsletter* infoHUBDAT. Teriring salam hangat dan doa kepada pembaca sekalian semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, dengan harapan dapat menjadi bahan catatan dan refleksi kita bersama dalam memberikan pelayanan jasa transportasi darat kepada masyarakat.



Pembaca yang budiman, pandemi Covid-19 belum berakhir, bahkan justru di beberapa daerah angka pasien yang terkonfirmasi positif terus naik. Namun demikian pasien yang sembuh juga bertambah. Pemerintah melakukan segala upaya untuk melindungi warganya. Tidak hanya dengan 3M (menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan) tapi juga didukung 3T (*testing, tracing, treatment*) dan juga vaksin. Mari kita dukung program vaksinasi demi kesehatan kita bersama. Vaksin tak hanya melindungi diri kita sendiri tetapi juga melindungi bangsa ini.

Di setiap pergantian tahun, kita selalu disibukkan dengan penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Namun ada yang berbeda pada Nataru kali ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Angkutan Nataru yang diselenggarakan di tengah masa pandemi, sungguh memerlukan perhatian khusus. Untuk mengatur mobilisasi masyarakat pada saat libur Nataru 2020/2021, sesuai arahan Menteri Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengeluarkan SE 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dengan Transportasi Darat Selama Masa Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi Covid-19.

Masyarakat yang akan melakukan perjalanan darat ke luar kota diimbau untuk menjalani *rapid test antigen* dengan hasil negatif. Kementerian Perhubungan bersama Korlantas Polri dan juga pemerintah daerah mengadakan *random check* pemeriksaan *rapid test antigen* di beberapa lokasi, antara lain *rest area*, jembatan timbang, terminal, perbatasan provinsi, atau pun di tempat-tempat lain yang dipandang perlu. Pendekatan yang dilakukan petugas bukan untuk menjatuhkan sanksi, namun semata-mata agar masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan, demi mencegah meluasnya penyebaran Covid 19.

Akhir kata, pada kesempatan ini saya sampaikan Selamat Natal bagi yang merayakan, dan Selamat Tahun Baru untuk kita semua. Saya sampaikan juga himbauan untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, baik diri pribadi maupun lingkungan sekitar. Tetap jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, jika keluar rumah, selalu kenakan masker, dan terapkan protokol kesehatan. Bagi rekan-rekan yang harus bertugas di lapangan, saya sampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih. Inilah saatnya kita membuktikan bahwa eksistensi kita berguna bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara tercinta. Tetap semangat dan tetap sehat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya pada kita semua. Amin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,**

**Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.**





**Foto Cover:**  
**BKIP Kemenhub/Daniel Pietersz**

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengenakan seragam pengemudi bus, dengan latar bus Trans Jogja program *Buy The Service*, Jakarta, 4/12/2020.

**PENANGGUNG JAWAB**  
Marta Hardisarwono

**REDAKTUR PELAKSANA**  
Endy Irawan

**REDAKTUR UTAMA**  
Pitra Setiawan  
Nanang Rahardjo  
Aznal

**REDAKTUR**  
Ardian Sukmaji  
Adi Prabowo  
Dinda Siahaan  
Hanna Suryadika

**DESAIN GRAFIS DAN FOTOGRAFI**  
Arif Pintoko  
M. Aulia Dharma  
Herman Wibowo  
Andrew Bryan Agustinus

**SEKRETARIAT**  
Bejo Sri Wahono  
Ratna Syaka Aprilda  
Sari Hayu Hutami  
Ely Rusnita  
Nurhayati  
Yudha Kurniawan  
Kurniadi Zaini  
Didik Prasetyo  
Rifai Dyan Armananta  
Nolita  
Rusdinal  
Achmad Nanang  
Rosmala Damayanti  
Nova Yulianasari Sopiah  
M. Yunus  
Reza Saputra  
Nurfadilah Sinta Ningrum  
Ade Yunita  
Saras  
Rajib

**KONTRIBUTOR**  
Junedi Sembiring  
Nurita Aprilianing Tyas  
Marisa  
Wahyu Arya Putra  
Prisca Magdalena Samosir  
Arief Eko Sumba  
Cristian Andri Mardhani  
Laurence  
Erleika Affan  
Ririn Scorviyanti  
Rinto Mahendra Raharjo



**Diterbitkan oleh:**

Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat  
Gedung Karya Lantai 9  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8  
Jakarta Pusat 10110  
Telp./Fax. : (021) 3506141

email : [humas.hubdat@gmail.com](mailto:humas.hubdat@gmail.com)

website : <http://hubdat.dephub.go.id/>

@hubdat151

ditjen perhubungan darat

@ditjen\_hubdat

ditjen perhubungan darat

## Info Redaksi

Pembaca *Newsletter* infoHUBDAT yang budiman,

Pandemi Corona belum usai. Kewaspadaan dan kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari harus tetap dijaga. Agar roda perekonomian terus bergulir, kegiatan masyarakat tak boleh terpenjara dalam jeruji pandemi. Dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, kita bisa beraktivitas kembali meraih mimpi-mimpi yang sementara ini terhenti akibat pandemi. Secercah harapan muncul di tengah gelapnya pandemi. Vaksin telah hadir untuk melindungi diri dan melindungi negeri. Semoga pandemi segera berhenti.

Para pembaca yang budiman, pada edisi kali ini, *Newsletter* infoHUBDAT menampilkan Laporan Utama mengenai program *Buy The Service* untuk konektivitas angkutan perkotaan yang tampil dengan judul Naik Bus Bersama Teman Bus. Beberapa artikel telah kami siapkan untuk mendukung laporan utama, antara lain: Samakan Persepsi Dukong Teman Bus; Teman Bus Hadir di Yogyakarta; Teman Bus Hadir di Medan; Pengemudi Tenang Penumpang Senang; dan Bersama Sepakat Teman Bus.

Kemudian, kami sajikan pula tulisan mengenai penyelenggaraan Angkutan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Dalam rubrik info khusus Nataru, beberapa artikel kami sajikan, antara lain: Angkutan Nataru Sehat dan Selamat: *Random Check* Mudik Nataru; dan Menhub Evaluasi Angkutan Nataru 2020/2021.

Tak kalah menarik, ulasan mengenai penganugerahan Wahana Adhigana dan Abdi Yasa bagi perusahaan angkutan orang dan pengemudi berprestasi. Selain itu juga artikel tentang *Investor Gathering New Terminal Experience* untuk menjangkau minat investor pada proyek pengelolaan maupun revitalisasi terminal bus tipe A.

Kami sajikan pula artikel mengenai peresmian Dermaga IV Merak dan Bakauheni yang turut mendukung kelancaran transportasi logistik antara Jawa dan Sumatera. Selain itu juga kami sajikan laporan tentang Pelayaran Perdana Lintasan Ketapang-Lembar yang signifikan bagi distribusi logistik kawasan Indonesia timur.

Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pun telah kami himpun dan kami sajikan kepada pembaca sekalian dalam infoSelintas. Di bagian akhir, kami sajikan rekaman gambar peristiwa dan kegiatan unit kerja terkait melalui bidikan lensa. Semoga apa yang kami sajikan ini dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan para pembaca sekalian. (\*)



## daftar isi

EDISI TRIWULAN 04 / 2020



**Teman Bus Hadir di Yogyakarta**  
Sebuah bus Trans Jogja berhenti di halte Terminal Pakem, Yogyakarta (16/10/2020). Foto: HMS DJPD/CAS

### Info Utama

04

#### Naik Bus Bersama Teman Bus

Sejak diluncurkan pada awal 2020 hingga Desember 2020, Program TEMAN BUS (Transportasi Ekonomis, Mudah, Andal dan Nyaman) telah melayani 1,5 juta lebih perjalanan di lima kota besar di Indonesia.

10 Samakan Persepsi Dukong Teman Bus

12 Teman Bus Hadir di Yogyakarta

14 Teman Bus Hadir di Medan

### Info Khusus Nataru

20 Angkutan Nataru Sehat dan Selamat

22 *Random Check* Mudik Nataru

24 Menhub Evaluasi Angkutan Nataru 2020/2021

### Info Angkutan

26 Apresiasi Bagi Operator dan Pengemudi Berprestasi

Penganugerahan Wahana Adhigana dan Pemilihan Abdi Yasa merupakan apresiasi ...

### Info TSDP

28 Peresmian Dermaga IV Merak dan Bakauheni

30 Pelayaran Perdana Lintasan Ketapang-Lembar

### Info Prasarana

32 *Investor Gathering* Enam Terminal

Dengan mengusung konsep *New Terminal New Experience*, hadirnya terminal ...

### Info Sarana

34 Laboratorium Uji Emisi *Heavy Duty* R49 BPLJSKB

Hasil pembangunan peralatan pengujian emisi *Heavy Duty* R49 sudah siap ...

### Info Lalu Lintas

36 Rapat Kerja Teknis PPNS Bidang LLAJ 2020

### Info Selintas

37

- Antisipasi Cuaca Ekstrem, Dirjen Hubdat Imbau Petugas *Lashing* Truk di Kapal Penyeberangan
- Jelang Nataru 2020/2021, Ke-menhub-ASDP Imbau Masyarakat Optimalkan Ferizy
- Program Padat Karya di Terminal Cilacap, Ditjen Hubdat Ikutsertakan Masyarakat Setempat
- Kemenhub Dorong Dishub Daerah Gunakan Blu-E Pada Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- Kemenhub Serahkan Donasi 2 Miliar Untuk Akses Air Bersih dan 100 Unit Sepeda di NTT
- Dukung Kemudahan Perizinan Angkutan Penyeberangan, Ditjen Hubdat Luncurkan AIR SDP
- Pantauan Libur Nataru Menhub Via Heli : Arus Lalin Tol Japek dan Jalur Puncak Terpantau Lancar

### Lensa Hubdat

41

Rekaman Berbagai Peristiwa yang Terjadi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Melalui Bidikan Lensa



# NAIK BUS BERSAMA TEMAN BUS

Oleh: Tim infoHUBDAT

Sejak diluncurkan pada awal 2020 hingga Desember 2020, Program TEMAN BUS (Transportasi Ekonomis, Mudah, Andal dan Nyaman) telah melayani 1,5 juta lebih perjalanan.



Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengenakan seragam pengemudi bus, dengan latar bus Trans Jogja program *Buy The Service*, Jakarta, 4/12/2020. Foto: BKIP Kemenhub/ Daniel Pietersz

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi respon positif masyarakat atas program yang dilakukan dalam rangka pengembangan angkutan massal berbasis jalan dengan skema pembelian layanan (*Buy The Service*).

*Buy The Service* (BTS) adalah sistem pembelian layanan angkutan jalan oleh pemerintah kepada pihak operator angkutan umum untuk mendapatkan layanan angkutan jalan yang baik.

Hingga Desember, sistem BTS telah dilaksanakan di 5 kota percontohan yaitu kota Yogyakarta, Palembang, Denpasar, Medan dan Surakarta. Menyusul kemudian di tahun 2021 kota Surabaya, Banjarmasin, Bandung, Makasar, dan Banyumas.

Menhub bersyukur animo masyarakat menggunakan bus BTS cukup tinggi, sudah lebih

dari 1,5 juta perjalanan, dan hingga akhir Desember 2020 bisa mendekati 2 juta.

"Kita harus lakukan ini lebih intensif supaya minat masyarakat semakin meningkat dan bisa menikmati layanan bus yang baik," kata Menhub Budi Karya, Jumat, (4/12).

Pada 2020, Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat melaksanakan pengembangan angkutan massal berbasis jalan dengan skema pembelian layanan (*Buy The Service*) dengan Standar Pelayanan Minimal yang memenuhi aspek kenyamanan, keamanan, keselamatan, keterjangkauan, kesetaraan serta memenuhi aspek kesehatan.

Program BTS yang dikemas dengan nama ikonik TEMAN BUS ini merupakan embrio dari sistem transportasi massal berkelanjutan. Tujuannya untuk menghadirkan bus yang aman dan nyaman, serta memiliki kepastian jadwal

dan ketersediaan bus paling tidak setiap 10 menit.

"Melalui *Buy The Service*, selain membantu masyarakat untuk mendapatkan bus yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau. Juga bisa dimanfaatkan bagi para pengelola bus, koperasi, atau gabungan dari beberapa orang yang tadinya punya angkot namun sudah tidak produktif, bisa mengajukan diri untuk menjadi pengelola agar tetap mempunyai usaha dan penghasilan," ungkap Menhub.

Menhub berpesan, untuk semakin meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi bus, program ini perlu dilakukan secara konsisten dalam memberikan pelayanan bus yang baik. Selain itu perlu dilakukan sosialisasi dan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Daerah.

"Pelayanan harus terus dijaga dan tepat waktu. Kalau itu dilakukan, transportasi bus pasti

akan diminati karena mempunyai keunggulan *point to point* sehingga bisa menjadi bagian integrasi antarmoda" ujar Menhub Budi Karya.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, melihat tingginya animo masyarakat menggunakan BTS angkutan perkotaan ini, pihaknya optimis hingga tahun 2021 pengguna BTS akan menembus angka 10 juta pengguna. Sebab, dari lima kota percontohan yang sudah dioperasikan, belum semua koridor dibuka.

Palembang berencana membuka 8 koridor, namun baru dibuka 3, yaitu :

Koridor 1 : Alang-Alang Lebar - Dempo, PP  
Koridor 2 : Asrama Haji - Terminal Sako, PP  
Koridor 3 : Terminal Plaju - Stasiun Induk Jakabaring, PP

Yogyakarta memiliki 3 Koridor, yaitu :

Koridor 1 : Adisucipto -Terminal Pakem, PP  
Koridor 2 : Ngabean -Taman Kuliner Godean, PP  
Koridor 3 : Terminal Condong Catur - UGM - Terminal Pakem, PP

Solo direncanakan 6 koridor namun baru beroperasi 4, yaitu:

Koridor 1 : Bandara Adi Soemarmo - Terminal Palur, PP  
Koridor 2 : Sub Terminal Kerten - Terminal Palur, PP  
Koridor 3 : Terminal Kartasura - Tugu Cembengan, PP  
Koridor 4 : Terminal Kartasura - Terminal Palur, PP

Denpasar direncanakan membuka 6 koridor, namun baru dibuka 4, yaitu :

Koridor 1; Sentral Parkir Kuta Badung - Terminal Pesiapan Tabanan  
Koridor 2; GOR Ngurah Rai -

Bandara Ngurah Rai Koridor 3; Terminal Ubung - Pantai Matahari Terbit  
Koridor 4; Terminal Ubung - Sentral Parkir Monkey Forest

Medan direncanakan 8 koridor, namun baru dibuka 5 yaitu :

Koridor 1 : Terminal Pinang Baris - Lapangan Merdeka, PP  
Koridor 2 : Terminal Amplas - Lapangan Merdeka, PP  
Koridor 3 : Belawan - Lapangan Merdeka, PP  
Koridor 4 : Medan Tuntungan - Lapangan Merdeka, PP  
Koridor 5 :Tembung - Lapangan Merdeka, PP

Selain itu selama masa pandemi Covid-19 hanya 70 persen dari kapasitas yang dipakai. Padahal, di Bali turis masih belum memanfaatkan angkutan umum ini.

Selama masa uji coba, minat masyarakat terhadap BTS cukup bagus. Di Surakarta *load*



factornya mencapai 48 persen, Denpasar dan Palembang juga cukup bagus, bahkan Medan yang paling baru sudah mencapai 25 persen.

“Ke depan saya yakin *load factor* akan terus meningkat. Ini yang membuat saya optimis bisa menembus angka 10 juta sampai akhir tahun 2021,” kata Dirjen Budi.

Selain itu, lanjutnya, di tahun 2021 beberapa kota seperti Surabaya, Banjarmasin, Bandung, Makassar dan Banyumas akan mulai mengoperasikan BTS. Untuk itu pemerintah terus mensosialisasikan program BTS ini secara masif.

“Kita harus mengubah kebiasaan dari menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan umum perkotaan. Padahal menggunakan kendaraan pribadi menimbulkan banyak dampak negatif seperti, kemacetan, polusi, dan ketidakberaturan hingga *stress*,” kata Budi.

Oleh karenanya, pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah akan terus mengembangkan program ini ke 19 Ibu Kota Provinsi di Indonesia pada 2021 mendatang.

Dengan semakin meningkatkannya jumlah perjalanan TEMAN BUS, diharapkan dapat menghasilkan sejumlah keuntungan bagi masyarakat diantaranya ialah:

- Memberikan rasa nyaman dan aman bertransportasi menggunakan transportasi bus.
- Mendapatkan layanan transportasi yang terjangkau.
- Menurunnya kemacetan dan polusi udara karena konsumsi



Sebuah bus Trans Metro Dewata melintas di jalanan Kota Denpasar, Bali (7/9/2020). Foto: HMS DJPD/WBW.

Angkutan *Bus Rapid Transit* (BRT) ini menjadi penunjang mobilisasi masyarakat Bali khususnya area Denpasar dan sekitarnya yang terkoneksi dengan Bandara Internasional Ngurah Rai, serta terminal-terminal lain dan mencakup hingga ke wilayah luar Kota Denpasar seperti Tabanan, Ubud, Gianyar, Sukawati, Banjar Tegal Jaya dan Sanur.



Artis Luna Maya mencoba bus Trans Metro Dewata dari Bandara Ngurah Rai ke Kuta. Dia mengatakan terharu di Bali ada bus. “Aku pertama kali, terharu di Bali ada bus. Jadi kita mau jalan-jalan sekarang naik bus,” ujar Luna. Menurutnya bus ini telah menerapkan protokol kesehatan dengan menyediakan *hand sanitizer* dan jaga jarak. Hal itu membuat Luna tak takut tertular Covid-19 ketika naik bus di Bali (26/11/2020). Sumber: Akun Youtube Luna Maya <https://www.youtube.com/channel/UCyJQkeVSZiAuHniNutEcP4w>

bahan bakar menurun akibat masyarakat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum.

Direktur Angkutan Jalan Ahmad Yani menambahkan, bahwa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Program Teman Bus akan terus dikembangkan di kota besar lainnya di Indonesia.

Ahmad Yani menyampaikan program ini merupakan bagian layanan publik yang diberikan pemerintah. Termasuk moda

transportasi umum bagi wisatawan, khususnya di DIY yang merupakan salah satu destinasi wisata unggulan tanah air.

Selain itu, penyelenggaraan angkutan umum saat ini harus mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru serta memenuhi kesesuaian protokol kesehatan dampak dari adanya pandemi covid-19.

“Selama pandemi covid-19 ini kita usahakan seluruh armada angkutan perkotaan sudah sesuai SOP dan selalu memperketat protokol kesehatan pencegahan

covid-19. Seluruhnya yang ada di bus wajib mengenakan masker tanpa kecuali dan jaga jarak dengan pengaturan kursi,” jelas Ahmad Yani.

TEMAN BUS, Menurut Yani dilengkapi dengan teknologi terbaru untuk mempermudah pengawasan dengan sistem online. Bus BTS juga memiliki *blackbox* seperti pesawat, untuk mengetahui kronologi jika terjadi kecelakaan, yang mungkin disebabkan oleh pengemudi atau ada kendaraan lain yang menabrak.

“Sementara ini di sebagian kota percontohan program BTS, bus yang digunakan berukuran sedang karena jalan yang dilalui tidak terlalu lebar. Ke depan untuk Bali, Surabaya, dan Bandung akan menggunakan bus besar seperti Scania atau Mercedes Benz yang digunakan oleh TransJakarta,” pungkasnya.

### Sinergi dengan KemenPUPR dan Korlantas Polri

Kehadiran program BTS di Indonesia merupakan langkah awal untuk mengurai kemacetan lalu lintas,

**Buy The Service (BTS) adalah sistem pembelian layanan angkutan umum oleh pemerintah kepada pihak operator angkutan umum untuk mendapatkan layanan angkutan umum yang berkualitas.**

meng- hadirkan angkutan perkotaan yang ramah lingkungan, dan menjamin transportasi yang nyaman, aman, serta berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya tentunya Kementerian Perhubungan perlu bersinergi dengan banyak pihak dan pemangku kepentingan lain, diantaranya Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR serta Korlantas Polri.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi mengatakan, “Penggunaan kendaraan pribadi yang cukup banyak dan masif di Indonesia berdampak pada masalah pemborosan BBM, kemudian juga kemacetan lalu lintas yang berdampak seperti kerugian waktu, kerugian ekonomi, lingkungan menjadi tidak sehat akibat polusi udara dan polusi suara, serta kecelakaan lalu lintas.”

Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 158 disebutkan bahwa Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan.

“Jadi artinya Pemerintah harus dapat menjamin angkutan umum yang sesuai dengan harapan masyarakat seperti *headway*-nya jangan terlalu lama, selain itu biaya yang murah juga dibarengi dengan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat menggunakan transportasi umum,” kata Dirjen Budi.

Dirjen Budi menambahkan, sejak tahun 2017 Kementerian Perhubungan sudah membuat suatu program untuk mendukung angkutan umum perkotaan yaitu dengan program *Bus Rapid Transit* (BRT). Program BRT ini sudah ada sebelum program BTS. “Sebelum BTS ini, Kemenhub telah memiliki program BRT dengan skema Pemerintah membeli bus setelah itu diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengaturnya. Kemudian di tahun 2019, Pemerintah membuat



program lainnya yaitu BTS yang eksekusinya pada tahun 2020 ini,” ucap Dirjen Budi.

Senada dengan pernyataan tersebut, Pantja Dharma Oetojo, Kepala Sub Direktorat Keterpaduan Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR mengatakan, “Kami (Ditjen Bina Marga) sangat mendukung program BTS ini melalui penyediaan infrastruktur di koridor-koridor yang dilalui dan lebih khusus lagi yang melalui jalan-jalan nasional di kota-kota yang menjadi lokasi implementasi BTS ini.”

Menurut Pantja, kota-kota akan terus bertumbuh, masyarakat berpindah dari pedesaan ke perkotaan dan tentunya akan menambah kepadatan masyarakat dan lalu lintas, bahkan diprediksikan pada tahun 2030 terdapat sekitar 60% penduduk Indonesia berada di wilayah perkotaan. “Dengan adanya pertumbuhan ini tentunya akan semakin membutuhkan prasarana dan sarana transportasi yang mendukung, maka itu peran kita sebagai Pemerintah harus dapat memberikan solusi dengan mengoptimalkan dan membangun



Pengemudi bus Batik Solo Trans kini tampil rapi, lengkap dengan topi dan seragam. Dengan konsep *Buy The Service*, pemerintah ingin menghadirkan layanan angkutan umum massal berbasis jalan di wilayah perkotaan. *Buy The Service* dengan ikonnya Teman Bus telah hadir di 5 kota besar di Indonesia, yaitu Palembang, Solo, Yogyakarta, Denpasar, dan Medan. Foto: HMS DJPD

infrastruktur yang sejalan dengan peningkatan transportasi baik dari segi kualitas, pelayanan, maupun aspek keselamatan,” jelas Pantja.

Lanjutnya, Pantja mengatakan dukungan dukungan untuk rencana pembangunan infrastruktur khususnya di kawasan perkotaan, instrumen-

instrumennya sudah cukup lengkap diantaranya adanya pedoman perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana di kawasan perkotaan, perencanaan fasilitas disertai dengan standarnya, serta persyaratan aksesibilitas untuk jalan umum.

Selain itu menurut Risya Mustario selaku pembicara dari Ditkamsel Korlantas Polri menyatakan pihaknya siap mendukung penegakan hukum dalam manajemen rekayasa lalu lintas pada penerapan BTS. Ia menjelaskan bahwa sesuai amanat tugas pokok fungsinya Polri dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 adalah bertugas melaksanakan edukasi, *engineering*, rekayasa, *enforcement*, penegakan hukum, registrasi dan identifikasi. “Pentingnya lalu lintas bagi urat nadi masyarakat artinya segala bentuk kehidupan masyarakat dari hal besar dan kecil seluruhnya berkaitan dengan lalu lintas, oleh karena itu baik buruknya berlalu lintas di masyarakat tergantung dari cermin budaya masyarakat. Sehingga hal tersebut mendorong Polri saat ini untuk mendukung segala program yang berkaitan dengan lalu lintas khususnya program BTS ini terkait *trouble spot*,” jelas Risya.

Lebih lanjut lagi, Dirjen Budi menambahkan bahwa Pemerintah

telah mensubsidi 100% biaya operasional kendaraan yang diperlukan sehingga masyarakat dapat menikmati Teman Bus dengan gratis. “Subsidi ini agar layanan angkutan juga dapat melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan. Selain itu kami harapkan karena tanpa biaya, gratis maka dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat,” tambah Dirjen Budi.

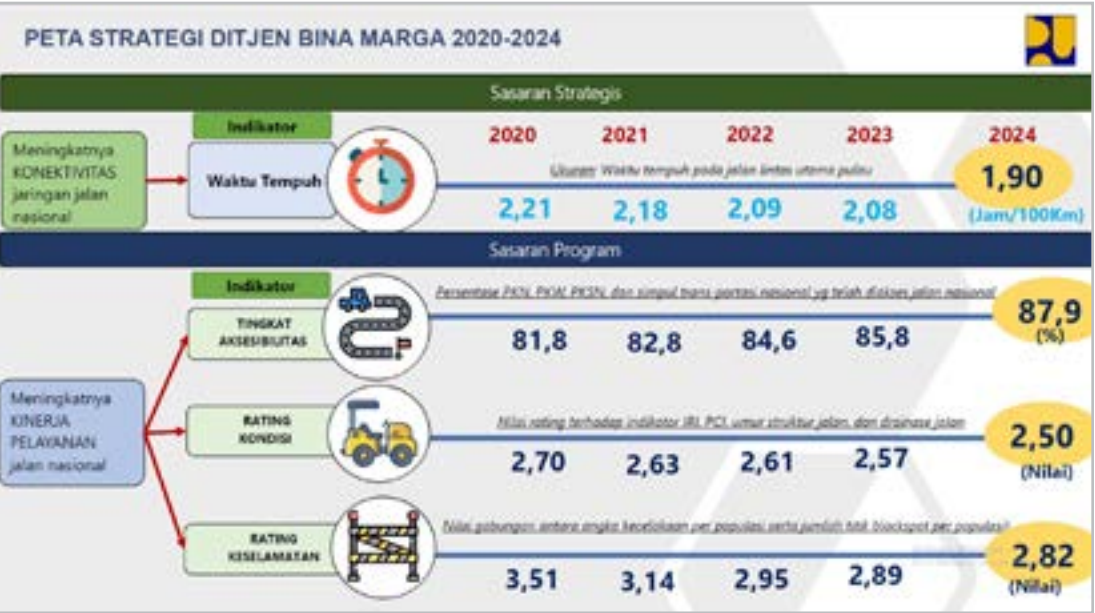
Adapun standar pelayanan minimal agar layanan angkutan memiliki kualitas dan pelayanan yang prima yakni:

1. Keamanan, contohnya Ketersediaan CCTV, *ID Card Driver* dan Tombol *Hazard*;
2. Keselamatan, contohnya SOP Pengoperasian kendaraan, SOP Keadaan Darurat, dll;
3. Kenyamanan, contohnya suhu dalam bus, kebersihan, lampu penerangan;
4. Keterjangkauan, contohnya aksesibilitas, tarif;
5. Kesetaraan, contoh ketersediaan kursi prioritas;

6. Keteraturan, contoh waktu tunggu, kecepatan perjalanan dan waktu berhenti di halte.

Penerapan SPM ini nantinya harus dipenuhi oleh operator saat menjalankan layanan bus. Selain itu keunggulan Teman Bus hadir dengan ditunjang oleh fasilitas teknologi untuk berusaha mewujudkan kondisi pelayanan angkutan massal perkotaan yang jauh lebih prima dibandingkan sebelumnya. Penggunaan teknologi *Internet of Things* (IoT) dalam bus juga sudah mulai diterapkan.

Hal ini terlihat dari beragam fasilitas yang terdapat di bus seperti *passenger counting*, mobile DVR untuk monitoring yang dapat mengirimkan dengan kecepatan sinyal 2G-3G-4G, GPS *tracking*, kamera pengawas, serta CP4 yakni perangkat untuk memonitor kendaraan pada *dashboard panel driver* dan absensi *driver* dengan menggunakan *RFID card*.(\*)



**Peta Strategi Ditjen Bina Marga 2020-2024**  
Sumber: Bahan paparan Pantja Dharma Oetojo, Kepala Sub Direktorat Keterpaduan Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR; Dukungan Pembangunan Infrastruktur dalam Pengembangan BRT di Perkotaan



# SAMAKAN PERSEPSI DUKUNG TEMAN BUS

Pemerintah daerah, operator dan *stakeholder*, serta pemangku kepentingan yang mendapat bantuan proram *Buy The Service* (BTS) dari pemerintah pusat harus memiliki kesamaan pemahaman dan pandangan dalam pelaksanaan peraturan dan perundangan yang telah ditetapkan.

Demikian disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Imran Rasyid, pada pembukaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perhubungan Darat tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Solo, Selasa (17/11).

Sosialisasi semacam ini perlu dilakukan dalam rangka penyampaian produk peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan darat yang telah ditetapkan.

“Tujuannya agar substansinya dapat dipahami oleh semua pihak sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan kendala dalam pelaksanaannya,” jelas Imran. Penyelenggaraan angkutan umum memegang peranan penting dalam menunjang, memperlancar, dan meningkatkan pembangunan perekonomian baik regional maupun nasional serta memajukan kesejahteraan masyarakat banyak.

Dalam rangka memenuhi tujuan dari penyelenggaraan angkutan

umum tersebut, pemerintah berkewajiban menyediakan layanan angkutan umum yang memadai dan menjangkau semua wilayah.

Guna mewujudkan tujuan tersebut maka pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan atau program yang disebut dengan *Buy the Service* atau pembelian layanan angkutan umum. Di mana prinsip dasar program pembelian layanan adalah pemerintah mengalokasikan anggaran guna membeli layanan jasa angkutan yang disediakan oleh perusahaan angkutan umum (BUMN, BUMD, ataupun swasta) dengan kriteria tertentu yang terlebih dahulu ditetapkan dan disepakati, untuk kemudian pihak perusahaan penyedia jasa menjalin kontrak kerja dengan pemerintah yang menyediakan anggaran.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan *Buy the Service*, maka pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan antara lain:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM



Trans Metro Deli, Medan



Trans Metro Dewata, Denpasar



Trans Musi Jaya, Palembang



Trans Jogja, Yogyakarta



Batik Solo Trans, Surakarta

- 9 tahun 2020 tentang pemberian subsidi angkutan penumpang umum perkotaan;
2. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.2748/AJ.206/DRJD/2020 tentang penyelenggara manajemen pengelolaan angkutan penumpang umum perkotaan dengan pembelian layanan;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.2749/AJ.206/DRJD/2020 tentang standar pelayanan prosedur *monitoring* dan evaluasi pembelian layanan pada angkutan umum perkotaan;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.2750/AJ.007/DRJD/2020 tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pada penyelenggaraan

angkutan penumpang umum perkotaan dengan skema pembelian layanan.

5. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.2752/AJ.206/DRJD/2020 tentang perhitungan biaya operasional kendaraan subsidi angkutan penumpang umum perkotaan dengan pembelian layanan.

“Peraturan-peraturan tersebut disusun dan ditetapkan sebagai pedoman bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pembelian layanan angkutan umum dengan memberikan subsidi kepada daerah dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat,” ujar Imran.

Adapun pemerintah daerah yang telah melaksanakan program *Buy the Service* ini di antaranya

Medan, Palembang, Yogyakarta, Solo, dan Denpasar.

Dengan adanya subsidi pada angkutan umum ini diharapkan pengguna angkutan umum semakin meningkat dan dapat mengurangi kemacetan. Dalam skema pembelian layanan, penumpang akan membayar tarif lebih rendah karena sebagian tarif dibayarkan oleh pemerintah.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Hari Prihatno dalam sambutan selaku tuan rumah mengatakan, “Solo merupakan satu-satunya kota yang bukan Ibukota Provinsi yang ditunjuk sebagai *pilot project* program *Buy the Service* oleh Kementerian Perhubungan.”

Setidaknya ada tujuh kriteria yang diperlukan untuk menjadi kota penerima program bantuan program *Buy the Service* diantaranya adalah memiliki penduduk besar namun belum terlayani dengan sarana angkutan umum atau sarana angkutan umum yang ada tidak optimal.

Pelayanan angkutan umum yang sudah ada menunjukan trend positif dan mampu bertahan dari tekanan penggunaan kendaraan pribadi.

“Memiliki ambisi besar serta komitmen namun masih banyak membutuhkan bantuan khususnya dalam hal keuangan. Dan Solo bisa memenuhi syarat yang ditetapkan Kemenhub,” kata Hari. (\*)





**B**us Trans Jogja berwarna kuning kombinasi hijau bergerak perlahan meninggalkan Bandara Adisucipto, Yogyakarta. Sekitar satu jam perjalanan setelah melewati sejumlah wilayah di pinggiran kota akhirnya bus sampai di tujuan akhir, di Terminal Pakem.

Terminal Pakem adalah terminal milik Pemda Kabupaten Sleman. Terminal itu sudah sejak lama tidak digunakan, yang kemudian beralih fungsi menjadi pasar. Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Yogyakarta sebagian dari terminal yang sebagian sudah beralih fungsi menjadi pasar itu, kemudian dialih fungsikan kembali menjadi terminal.

Selain koridor Bandara Adisucipto-Terminal Pakem, bus dengan program *Buy The Service* (BTS) angkutan perkotaan Yogyakarta juga melayani dua koridor lainnya, yaitu koridor Ngabean-Taman Kuliner Godean dan koridor Terminal Condong Catur-UGM-Terminal Pakem yang dilayani oleh 44 bus BTS dimana 4 bus digunakan sebagai cadangan.

Kabid Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sumariyoto menuturkan, dengan melayaninya 3 koridor tersebut ini berarti sudah 25 kecamatan di DIY terlayani angkutan perkotaan, dimana 17 jalur dilayani oleh angkutan eksisting Trans Jogja dengan 128 armada yang tersedia.

Lebih lanjut Sumariyoto menjelaskan, ke tiga koridor yang dilayani oleh BTS Trans Jogja dengan berlogokan Tugu Yogyakarta ini terintegrasi dengan bus Trans Jogja. Misalnya di Ngabean, TEMAN Bus akan terkoneksi dengan 11 rute Trans Jogja. Demikian juga koridor Bandara Adi Sutjipto akan terintegrasi dengan Trans Jogja ke arah Tugu dan Malioboro atau ke Prambanan.

Hadirnya TEMAN Bus mendapat sambutan baik dari masyarakat



Sejumlah bus Trans Jogja terparkir rapi di pool PT. Jogja Tugu Trans, Yogyakarta. Foto: HMS DJPD/CAS

# TEMAN BUS HADIR DI YOGYAKARTA

khususnya masyarakat di tiga kecamatan di Sleman yaitu Kecamatan Ngaglik, Ngemplak dan Godean yang selama ini belum tersentuh angkutan umum perkotaan.

Wildan (26) warga Cangkringan yang sehari-hari bekerja di kawasan bandara, mengaku sangat senang dengan hadirnya BTS, karena tidak perlu lagi melaju dengan sepeda motor yang sudah menemaninya 7 tahun lebih untuk menuju kantornya.

Kini Wildan memanfaatkan jasa Bus Trans Jogja dari rumahnya menuju tempat ia bekerja. "Selain hemat ongkos, saya juga bisa

hemat tenaga. Saya bisa istirahat selama dalam perjalanan menuju dan dari kantor, kalau naik motor mana bisa istirahat," ujarnya.

Demikian halnya dengan Gisti (32) salah seorang perawat di rumah sakit swasta setiap harinya pulang pergi berboncengan dengan suaminya.

"Sejak adanya BTS, pagi saya berangkat bareng suami tapi kalau pulang memanfaatkan bus BTS. Saya sangat terbantu sekali, karena pulang kerja kan biasanya sudah lelah, jadi saya bisa istirahat di bus menuju rumah. apalagi bus nya bersih dan nyaman", kata Gisti.

Lain pula dengan Sumiati (35). Selama masa uji coba, Sumiati bersama tiga orang anaknya yang masih kecil juga memanfaatkan kehadiran BTS yang dikelola oleh Jogja Tugu Trans (JTT) untuk jalan-jalan. Pulang pergi dari Terminal Pakem ke Bandara Adisucipto dan kembali ke Terminal Pakem.

"Mumpung masih liburan dan busnya masih gratis saya ngajak anak-anak untuk jalan-jalan. Selain bersih, bus nya juga adem karena pakai AC," kata Sumiati.

## Pelayanan Prima

Direktur Utama PT Jogja Tugu Trans (JTT) Agus Andrianto mengatakan, pihaknya selaku operator yang ditunjuk terus melakukan persiapan dan penyempurnaan. Sarana dan prasarana seperti bus, halte, sistem peralatan IT dan sumber daya manusia terus di siapkan.

Karena program BTS dari Kementerian Perhubungan dengan konsep pembelian layanan (BTS) berbeda dengan program angkutan perkotaan sebelumnya yang hanya memberikan bantuan bus kota.



Kabid Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumariyoto. Foto: HMS DJPD/CAS



Agus Andrianto, Direktur Utama PT. Jogja Tugu Trans (JTT). Foto: HMS DJPD/CAS

Misalnya, bus harus sudah sesuai dengan adaptasi kebiasaan baru. "Yang jelas seluruh armada kami harus disesuaikan sesuai standar protokol kesehatan pencegahan Covid-19," kata Agus.

Sebelum bus dioperasikan tim dari Surveyor Indonesia melakukan pengecekan kesiapan armada, baik rem, lampu, ban, kaca spion, kelengkapan *hand sanitizer* dan sebagainya. Selain itu dilakukan pula penyemprotan desinfektan untuk sterilisasi kendaraan serta pengecekan kesehatan bagi juru mudi maupun pramugara. Juga dilakukan pengaturan jaga jarak dengan penerapan maksimal 70 persen kapasitas penumpang.

Setiap penumpang masuk, pengemudi selalu mengingatkan agar penumpang menggunakan *hand sanitizer* yang disediakan di dalam bus, menggunakan masker dan menjaga jarak dengan penumpang lainnya. Karena BTS Jogja berkeinginan memberikan pelayanan prima untuk penumpangnya.

Tim Surveyor Indonesia yang bertugas melakukan pengawasan di dalam bus juga telah melakukan tugasnya dengan baik. Petugas tim ini naik dan berpindah dari satu bus ke bus lain untuk memastikan layanan BTS seperti kebersihan, keamanan, kenyamanan, ketersediaan fasilitas pendukung seperti *hand sanitizer*, tempat duduk, serta penumpang selalu menggunakan masker.

Selain itu tim ini juga harus memastikan apakah sistem informasi di dalam bus yang menginformasikan halte pemberhentian selanjutnya maupun kamera CCTV yang terpasang di dalam bus berfungsi dengan baik. Karena CCTV inilah yang akan mendeteksi berapa jumlah penumpang yang terlayani pada hari itu.

Di terminal tim dari Surveyor Indonesia juga bertugas mengatur waktu pemberangkatan bus agar tidak terlalu berdekatan satu sama lainnya. "Kalau yang di depan baru berangkat, tugas kami mengatur keberangkatan bus selanjutnya supaya tidak terlalu rapat jaraknya," jelas Andreas di Terminal Pakem. (\*)



# TEMAN BUS HADIR DI MEDAN

Kehadiran TEMAN BUS di Kota Medan menjadi layanan yang kelima dalam program *Buy The Service* (BTS) yang digagas oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Operator yang menjalankan operasional layanan TEMAN BUS di Kota Medan adalah PT. Medan Bus Transport (Trans Metro Deli).

Kementerian Perhubungan meresmikan layanan *Buy The Service* (BTS) TEMAN BUS yang kini melayani Medan, Sumatera Utara. Di Medan, Teman Bus yang diberi nama Trans Metro Deli tersedia dalam 5 koridor dengan 72 unit bus.

Dalam kesempatan itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

menyampaikan bahwa, “Esensi yang kita lakukan hari ini adalah bagaimana Medan mempunyai angkutan massal yang masif, bagus, dan signifikan. Harapannya di akhir tahun 2021, lompatan angkutan massal ini meningkat dengan baik. Langkah konkrit yang kita lakukan adalah dengan program *Buy The Service* (BTS). BTS adalah suatu program subsidi



**Trans Metro Deli**  
Sebuah bus Trans Metro Deli disiapkan menjelang peresmian di Terminal Bus Amplas, Medan (8/11/2020). Foto: HMS DJPD/WBW



bagi angkutan massal perkotaan di mana terjadi gap antara daya beli masyarakat dengan *cost* yang dikeluarkan operator, selisihnya kita bayar sampai suatu waktu tertentu daerah tersebut sudah mampu diberlakukan komersil, makanya kita tidak memberikan bus tapi memberikan subsidi,” jelas Menhub saat menghadiri kegiatan *Launching* Program Pembelian Layanan Angkutan Perkotaan (*Buy The Service*) di Provinsi Sumatera Utara, peletakan batu pertama Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Amplas, dan Peninjauan Program Padat Karya pada Minggu (8/11) di Terminal Amplas, Medan.

Melalui laporannya dalam acara tersebut Direktur

Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Budi Setiyadi menyebutkan bahwa Program BTS ini telah hadir di 5 kota besar, yakni Palembang, Solo, Denpasar, Medan, dan Yogyakarta.

“Kita harapkan acara hari ini dapat dimulai *flag off* Teman Bus di Medan. Terkait program BTS ini akan didukung oleh manajemen pengelola yang melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan menggunakan sistem operasional kendaraan yang meliputi sistem operasional, pemeliharaan, pengelolaan keuangan, sistem SDM yang didukung dengan digitalisasi secara *real time*, sehingga diharapkan menuju pelayanan angkutan umum yang lebih profesional,” kata Dirjen Budi.

Di Medan, Trans Metro Deli ini hadir dengan lima koridor yang melayani:

- Koridor 1 : Terminal Pinang Baris – Lapangan Merdeka;
- Koridor 2 : Terminal Amplas – Lapangan Merdeka;
- Koridor 3 : Belawan – Lapangan Merdeka;
- Koridor 4 : Medan Tuntungan – Lapangan Merdeka;
- Koridor 5 : Tembung – Lapangan Merdeka.

Trans Metro Deli menggunakan kendaraan Bus Besar dan Bus Sedang dengan tipe *low entry*. Bus ini dilengkapi dengan kursi prioritas dan area untuk penumpang disabilitas (kursi roda).

“Layanan Teman Bus diharapkan akan menjadi sebuah layanan yang melengkapi pelayanan Trans Mebidang yang sudah ada. Layanan TEMAN BUS ini juga diharapkan menjadi bagian digitalisasi 4.0 *smart city program* yang mendukung *cashless society*. Program BTS yang memberikan subsidi penuh bagi operator dengan fasilitas pendukung di bus yang lebih baik, sehingga diharapkan lebih banyak penumpang yang beralih ke moda transportasi publik, yang saat ini masih gratis. Penumpang hanya menyiapkan kartu non tunai, dan buka aplikasinya untuk melihat rute, jadwal kedatangan dan keberangkatannya sehingga penumpang lebih mudah dalam mobilisasi di kawasan perkotaan,” urai Dirjen Budi. (\*)



# Pengemudi Tenang Penumpang Senang

Masyarakat menyambut baik hadirnya **TEMAN BUS** yang merupakan implementasi dari program *Buy The Service* di beberapa kota. Dengan adanya program ini diharapkan minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum kembali tumbuh.

Menjadi pengemudi Bus BTS Trans Jogja membuat Intika Chunda menjadi lebih disiplin. Waktu untuk bekerja, istirahat dan waktu untuk keluarga harus diatur sedemikian rupa.

Sebelum menjadi pengemudi BTS Chunda adalah pengemudi taksi *online*. Kendaraan yang digunakan adalah miliknya sendiri yang dibeli dengan cara kredit.

Sebagai pengemudi taksi online, ayah satu anak ini tidak pernah teratur waktunya. “Kalau uang buat cicilan msih kurang, kadang harus narik dari pagi hingga tengah malam,” keluh Chunda yang ditemui di Terminal Pakem. Ia juga harus memikirkan beli bahan bakar, uang untuk makan dan rokok, uang yang harus di bawa pulang ke rumah dan tentunya uang untuk membayar cicilan kendaraan.

Sekarang, sebagai pengemudi bus BTS, Chunda lebih tenang. Tidak lagi di kejar-kejar setoran. Ia hanya perlu istirahat yang cukup, karena pagi hari sudah harus berada di *pool* dan bertugas sesuai jam kerja. Tiap

bulan menerima gaji tetap dan mendapat jaminan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

\*\*\*\*\*

Dulu, sebagai pengemudi angkutan perkotaan di Kota Surakarta, Gunawan harus bersaing mengejar setoran dengan teman sejawatnya sesama sopir angkot.

Tidak jarang warga Karang Anyar ini harus kebut-kebutan bahkan saling menyalip dengan sopir angkot lainnya. “Kalau nggak gitu nggak *nutut* (tercapai) setoran nya,” kata Gunawan.

Untuk bisa membeli bahan bakar, setoran dan uang yang harus di bawa pulang, Gunawan harus bekerja seharian.

Kini sebagai pengemudi *feeder* BTS Batik Solo Trans, ia tidak perlu lagi melakukan tindakan yang dapat membahayakan penumpang dan dirinya. “Tugas saya sekarang membawa penumpang selamat sampai tujuan dengan nyaman,” ujarnya

Sebagai pengemudi angkot yang merupakan *feeder* BTS Kota Surakarta, Gunawan mendapat gaji tetap sesuai UMR. Nantinya ia juga akan diikutsertakan dalam program jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.

Aturan larangan merokok selama bertugas juga memberikan dampak positif. selain lebih sehat, juga bisa menghemat pengeluaran.

\*\*\*\*\*

Rumah dan tempat kerja Shepti kebetulan berada di jalan yang dilalui oleh bus BTS koridor Bandara Adi Sucipto - Terminal Pakem.

Sebelum ada bus BTS sehari-harinya Shepti menggunakan sepeda motor dari rumahnya ketempat kerjanya, pulang pergi.

“Sekarang ada bus enak. Bisa istirahat dan nggak capek. Apalagi sekarang kalau sore sering turun hujan. saya sangat terbantu sekali,” kata Shepti yang juga karyawan sebuah bank swasta.

Jika nanti tarif yang ditetapkan sebesar Rp 3.000 untuk sekali jalan, juga tidak memberatkan daripada harus ngelaju dari rumah ke tempat kerjanya dengan sepeda motor. (\*)



**Samping**  
Gunawan, pengemudi *feeder* Batik Solo Trans di Terminal Tirtanadi Solo (17/11/2020). Foto: HMS DJPD/ CAS

**Bawah**  
Intika Chunda, pengemudi bus BTS Trans Jogja di Terminal Pakem, Yogyakarta (16/11/2020). Foto: HMS DJPD/ CAS





Program *Buy The Service* dengan ikonnya TEMAN BUS yang dimulai sejak awal 2020 mendapat respon positif dari masyarakat. Terbukti dengan meningkatnya jumlah penumpang yang menggunakan jasa angkutan massal perkotaan berbasis jalan tersebut.

Beberapa daerah lain telah bersiap untuk mendapatkan layanan TEMAN BUS pada tahun mendatang dengan menandatangani nota kesepakatan. Daerah tersebut antara lain Kabupaten Banyumas dan Kota Surabaya.

#### Teman Bus Segera Hadir di Kabupaten Banyumas

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menandatangani Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas tentang Perencanaan, Pembangunan, dan Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan di Kabupaten Banyumas (14/10). “Banyumas sebagai salah satu Kabupaten yang cukup bagus perkembangan ekonominya mendapat dukungan dari pemerintah pusat dengan program *Buy The Service*,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi. “Dengan kehadiran pemerintah melalui *Buy The Service* mendidik masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadi,” lanjutnya.

Agar mudah diingat oleh masyarakat, program *Buy The Service* diimplementasikan dalam layanan transportasi publik berbasis aplikasi yang dinamakan “TEMAN BUS”.

Layanan Teman Bus di Kabupaten Banyumas yang akan hadir pada tahun 2021 diharapkan dapat terintegrasi dengan program angkutan umum yang telah dikembangkan sebelumnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Trans Jateng. “Saya harap hal ini menjadi percontohan juga untuk pengembangan layanan angkutan umum yang baik di kawasan perkotaan,” kata Dirjen Budi.



Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi (tengah) bersama Wakil Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono (kiri), dan Kabid Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah, Heribertus Slamet Widodo (kanan) usai penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Perencanaan, Pembangunan, dan Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan di Kabupaten Banyumas (14/10/2020). Foto: HMS DJPD/ABA

# BERSAMA SEPAKAT TEMAN BUS

**Kabupaten Banyumas dan Kota Surabaya menandatangani Nota Kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terkait penyelenggaraan Program *Buy The Service* untuk angkutan umum perkotaan.**

Dirinya menuturkan, dalam UU 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan mengamanatkan bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan angkutan umum. “Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus bersinergi memberikan pelayanan angkutan umum yang baik kepada masyarakat,” kata Dirjen Budi.

Dirjen Budi juga meminta kesiapan pemda, membuat strategi untuk menarik minat masyarakat menggunakan angkutan umum. “Misalnya dengan manajemen parkir, daripada bayar parkir mahal, masyarakat bisa naik angkutan umum yang nyaman dan gratis,” ujar Dirjen Budi. Karena menggunakan APBN, tentunya cakupan program BTS tidak tertutup hanya dalam lingkup Kabupaten Banyu-

mas. “Saya minta nanti BTS ini dapat juga menjangkau hingga ke Purbalingga, Cilacap, agar perkembangan wilayah aglomerasi di sekitar Banyumas dapat semakin baik,” katanya.

**Surabaya Teken Nota Kesepakatan** Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan bersama dengan Pemerintah Kota Surabaya menandatangani Nota Kesepakatan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Angkutan Umum Perkotaan di Surabaya pada Kamis (22/10).

Bertempat di Balaikota Surabaya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi berharap melalui kegiatan ini kehadiran angkutan umum perkotaan dengan skema *Buy The Service* dapat mengurangi polusi udara,

mengurangi kebisingan, kemacetan dan pengurangan subsidi BBM.

“Kita harapkan dengan kehadiran BTS ini dapat menghasilkan *shifting* dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Kami mohon Bapak Kadishub juga sudah mulai mempersiapkan strategi untuk menggunakan angkutan massal. Kota Surabaya ini akan dilaksanakan pada tahun kedua program BTS di 2021 mendatang,” jelas Dirjen Budi.

Dirjen Budi menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan Menhub *headway* bus nantinya harus tetap dijamin, tidak lebih dari 15 menit sehingga masyarakat tidak menunggu lama di halte. “Kami akan menyesuaikan dengan kebutuhan Pemkot Surabaya dan mempelajari ada berapa koridor karena akan menyangkut anggaran dan subsidi ke depannya,” ungkap Dirjen Budi.

Dalam kesempatan yang sama, Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengucapkan rasa terima kasihnya atas kehadiran program BTS ini di Surabaya pada tahun 2021 mendatang.

Melalui sambutannya, Risma juga menekankan bahwa dengan kehadiran BTS ini kelak akan men-



Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi menjelaskan aplikasi TEMAN BUS dapat diakses melalui *smartphone* kepada Walikota Surabaya Tri Rismaharini di Surabaya (22/10/2020). Foto: HMS DJPD/ABA



Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi bersama Walikota Surabaya Tri Rismaharini menandatangani Nota Kesepakatan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Angkutan Umum Perkotaan di Surabaya (22/10/2020). Foto: HMS DJPD/ABA

jadi pemicu perubahan perilaku masyarakat Surabaya agar lebih gemar lagi menggunakan angkutan umum. “Saya sampaikan ke Dinas Perhubungan kalau bus itu harus aman, bersih, tepat waktu,” tegas Risma.

Selain Surabaya, akan ada beberapa kota lainnya yang akan mendapatkan bantuan BTS yaitu Bandung, Makassar, Banjarmasin, Banyumas. Menjawab pesan Risma, Dirjen

Budi menyatakan, “Nanti Surabaya akan menjadi yang paling banyak anggarannya karena Surabaya mengajukan untuk 8 koridor artinya busnya sekitar 150 bus karena 1 koridor minimal ada 20 bus. Sesuai yang disampaikan Bu Risma nanti bus ini akan aman, bersih, mudah diakses masyarakat, dan modern. Anggarannya sekitar Rp 500 miliar untuk BTS di beberapa kota besar di tahun 2021.”(\*)



**M**enteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ingin memastikan pelayanan transportasi di masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) berjalan dengan sehat, aman, dan nyaman di tengah masa pandemi. Hal itu disampaikan Menhub saat membuka Posko Tingkat Nasional Angkutan Nataru 2020 di Jakarta, Jumat (18/12).

"Apa yang kita lakukan hari ini (pembukaan posko) adalah menerjemahkan perintah Presiden untuk di satu sisi memberlakukan protokol kesehatan dan di sisi lain harus tetap memberikan pelayanan transportasi dengan baik di tengah pandemi," jelas Menhub.

Menhub mengungkapkan, di masa pandemi ini aspek kesehatan menjadi suatu tumpuan yang tidak bisa dipisahkan dari aspek keselamatan bertransportasi.

Dengan dibentuknya Posko Tingkat Nasional Angkutan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, Menhub berharap seluruh *stakeholder* yang terkait bisa berkoordinasi dengan baik untuk menjaga pelayanan transportasi berjalan tetap berjalan dengan lancar dan tetap konsisten menerapkan protokol kesehatan.

Melalui posko ini, lanjut Menhub, diharapkan bisa mengantisipasi dengan baik jika terjadi puncak mudik baik di sektor darat, laut, udara, penyeberangan, kereta api.

"Saya mengapresiasi rekan-rekan dari seluruh *stakeholder* yang terlibat. Pesan presiden, jangan ada ego sektoral. Apa yang diinginkan presiden selama ini sudah kita lakukan bersama, yaitu bagaimana antar *stakeholder* seperti Kepolisian, Basarnas, BMKG, Jasa Marga, Operator Transportasi dan lain sebagainya, semua bersatu padu melaksanakan kegiatan ini dengan baik," ungkap Menhub.

# ANGKUTAN NATARU SEHAT DAN SELAMAT

**Untuk mengatur mobilitas masyarakat pada saat libur Nataru, Ditjen Perhubungan Darat menerbitkan SE 20 Tahun 2020. Dalam SE tersebut diantaranya menyebutkan bahwa setiap orang yang akan melakukan perjalanan wajib menerapkan protokol kesehatan 3 M: memakai masker, menjaga jarak dan hindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*.**

Lebih lanjut Menhub Budi menegaskan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik, mengingat dalam dua minggu terakhir angka positif Covid-19 semakin meningkat. Ia juga mengimbau agar masyarakat tetap berada di rumah dan tidak melakukan perjalanan bila memang tidak dirasa perlu.

Untuk mengantisipasi mobilitas masyarakat pada saat libur Nataru, saat ini Kemenhub tengah melakukan koordinasi intensif dengan Satuan Tugas Covid 19 yang akan menetapkan Surat Edaran. Kemenhub akan merujuk pada ketentuan dari Satgas tersebut dalam menerapkan SE untuk sektor transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian.

Dalam pembukaan posko tersebut, dilakukan pula *video conference* Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi beserta jajaran Kemenhub dari Posko Nasional, dengan Posko-posko di yang ada simpul-simpul transportasi di sejumlah daerah di Indonesia.

Sebagai informasi, Posko Terpadu Tingkat Nasional Angkutan Natal tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 secara serentak ini akan berlangsung dari H-7 (18 Desember 2020 sampai dengan H+10 (4 Januari 2021). Dalam

posko tersebut juga melibatkan Kepolisian RI, Dinas Perhubungan, BMKG, Badan SAR Nasional, KNKT, Kementerian Kominfo, Perum Damri, PT. ASDP Indonesia Ferry, PT. Pelni, PT. Pelindo II, PT. Angkasa Pura I, PT. Angkasa Pura II, PT. KAI, PT. Jasa Marga, dan instansi terkait lainnya.

## Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Darat Periode Nataru

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Surat Edaran bernomor SE 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dengan Transportasi Darat Selama Masa Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi Covid-19.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi pada Senin (21/12) menyatakan bahwa SE 20/2020 ini mulai berlaku sejak 19 Desember sampai 8 Januari 2021.

"Dalam SE 20 Tahun 2020 ini ada beberapa hal yang kami bahas yakni setiap orang yang akan melakukan perjalanan wajib menerapkan protokol kesehatan 3 M: memakai masker, menjaga jarak dan hindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*. Selain itu untuk perjalanan

ke Bali, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif *rapid test antigen* paling lama 3 hari sebelum keberangkatan dan mengisi e-HAC Indonesia," jelas Dirjen Budi.

Selain itu, untuk perjalanan dengan transportasi darat dari dan ke Pulau Jawa serta di dalam Pulau Jawa (antarprovinsi/ Kabupaten/ Kota), diimbau menggunakan *rapid test antigen* paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan wajib mengisi e-HAC Indonesia.

"Selain perjalanan ke Jawa dan Bali, *rapid test* antibodi masih boleh digunakan sesuai ketentuan yang ada, yaitu dengan hasil non reaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan. Khusus untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diwajibkan untuk tes RT-PCR maupun *rapid test antigen*

sebagai syarat perjalanan," jelas Dirjen Budi.

Sementara itu bagi perjalanan orang di dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan (Jabodetabek) tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat hasil *rapid test antigen* sebagai syarat perjalanan.

Dalam SE tersebut juga disebutkan, sewaktu-waktu Satuan Tugas Daerah dapat melakukan tes acak *rapid test antigen* maupun RT-PCR jika diperlukan.

"Seluruh ketentuan dalam SE 20/2020 ini berlaku bagi angkutan antar lintas batas negara, angkutan antarkota antarprovinsi, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan antarjemput antarprovinsi, angkutan pariwisata, kendaraan bermotor perseorangan (mobil penumpang dan sepeda motor), maupun angkutan sungai, danau, dan penyeberangan," pungkas Dirjen Budi. (\*)





**M**enteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengunjungi Terminal Kampung Rambutan, Rabu (23/12), untuk meninjau dan mengecek penerapan protokol kesehatan sekaligus *Random Check Rapid Antigen & GeNose* dalam rangka Libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, guna memastikan penumpang bisa melakukan perjalanan dengan bus secara aman, nyaman, dan sehat di tengah pandemi.

“Saya apresiasi para pihak terkait, Korlantas, Jasa Raharja dan Dishub yang bersedia turun dan melakukan *random check* rapid tes. Karena memang di darat itu tidak mungkin dilakukan semuanya,” ucap Menhub.

Menhub mengatakan *random check* ini merupakan pesan bahwa dalam masa pandemi ini kita harus berhati-hati. Upaya melakukan random check ini sangat penting agar mereka yang merasa kurang enak badan, tidak berangkat.

Pada tinjauan kali ini ada sembilan orang yang dilakukan *random check* rapid tes antigen. Dari sembilan orang tersebut, semuanya dinyatakan negatif.

“Di sini tadi saya mencatat ada sembilan orang, semuanya negatif. Jadi sebenarnya para pemudik sudah mengukur diri, kalau mau ke daerah harus dalam keadaan sehat. Dan terbukti *random* di dua tempat, di sini ada sembilan negatif semua. Oleh karenanya saya menganjurkan kepada pemudik yang hendak melakukan perjalanan, sekalipun kegiatan mudik ini adalah boleh-boleh saja tetapi harus dicatat kalau mereka hendak kembali ke kampung atau pergi berekreasi harus dalam keadaan sehat, kalau ada tanda-tanda batuk dan demam maka di rumah saja,” ujarnya.

Menhub mengatakan *random check* rapid test ini akan terus dilakukan, kerja sama antara



Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengunjungi Terminal Kampung Rambutan, Rabu (23/12), untuk meninjau dan mengecek penerapan protokol kesehatan sekaligus Random Check Rapid Test Antigen dalam rangka Libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Foto: HMS DJPD/ABA

## RANDOM CHECK MUDIK NATARU

**Random check ini merupakan pesan bahwa dalam masa pandemi ini kita harus berhati-hati. Upaya melakukan random check ini sangat penting agar mereka yang merasa kurang enak badan, tidak berangkat.**

Kemenhub, Dishub dan Korlantas Polri.

“Karena Kementerian Perhubungan kerja sama dengan Kepolisian dan Dishub akan melakukan random check dimana-mana. Yang pasti kita akan lakukan di terminal bus, rest area dan tempat-tempat yang ditetapkan oleh Dishub dan tempatnya kita rahasiakan. Saya minta ini tidak hanya dilakukan di Jakarta,” tuturnya.

Kemudian Menhub juga berpesan agar operator bus secara kontinyu dan konsisten terus menerapkan protokol kesehatan.

“Biasanya operator kaitannya dengan jaga jarak. Tadi saya naik ke atas bus, saya katakan bagus kalau ada 3 tempat duduk, cuma 2 yang diisi. Ini harus konsisten,” pungkasnya.

Sesuai Surat Edaran No. 3 Satgas Penanganan Covid-19 yang dirujuk oleh Kemenhub melalui Surat Edaran di empat matra yaitu darat, laut, udara, dan kereta api, disebutkan bahwa untuk perjalanan dari dan ke pulau Jawa serta di dalam pulau Jawa (antar Provinsi/Kab/Kota) diatur hal-hal sebagai berikut, salah satunya yaitu: Untuk pelaku perjalanan yang menggunakan

moda transportasi darat baik pribadi maupun umum, dihimbau menggunakan rapid test antigen paling lama 3x24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Kakorlantas Polri Irfan Pol Istiono dan Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo.

### Random Check di Terminal dan Jembatan Timbang

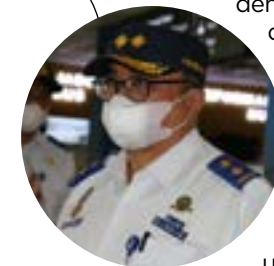
Sejalan dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 20/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dengan Transportasi Darat Selama Masa Natal Tahun 2020 Dan Tahun Baru 2021 dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan random check rapid test antigen di sejumlah Satuan Pelaksana (Satpel) di Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Jawa Tengah, di antaranya 3 Terminal Tipe A dan 4 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), sejak Kamis (24/12).



Random Check Rapid Test Antigen pada masa Nataru juga dilaksanakan di sejumlah rest area, UPPKB, dan Terminal Bus Tipe A. Foto: HMS DJPD

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di Terminal Tirtonadi, Terminal Mangkang, Terminal Pemalang, UPPKB Ajibarang, UPPKB Tanjung Brebes, UPPKB Subah, dan UPPKB Wanareja.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Marta Hardisarwono, yang hadir melakukan pantauan langsung ke Terminal Tirtonadi, mengatakan bahwa, “Rapid test antigen ini dilakukan kepada pemudi, penumpang bus, dan pengemudi angkutan logistik. Jumlah pemudik, penumpang, dan pengemudi angkutan barang yang menjalani rapid test antigen bisa berbeda di setiap terminal dan UPPKB. Untuk Terminal Tirtonadi dalam satu hari mencapai hingga 80 orang. Untuk menghindari kerumunan, pelaksanaannya dibagi menjadi dua shift, untuk shift I pukul 06.00-10.00 WIB dan shift II pukul 18.00-22.00.”



Selain itu, untuk perjalanan dengan transportasi darat dari dan ke Pulau Jawa serta di dalam Pulau Jawa (antarprovinsi/ Kabupaten/ Kota), rapid test antigen yang dianggap berlaku paling lama 3x24 jam sebelum keberangkatan, untuk kemudian digunakan sebagai persyaratan perjalanan dan pemudik juga diwajibkan mengisi e-HAC Indonesia.

Dalam melakukan rapid test antigen ini, Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat. Marta pun menyampaikan bahwa giat ini akan berlangsung sampai akhir masa liburan Tahun Baru 2021.(\*)

Setelah mendapatkan hasil pemeriksaan, pemudik dengan hasil negatif diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Namun, apabila dinyatakan positif akan ditempatkan di ruang isolasi terminal untuk kemudian dijemput tim Satgas Penanganan Covid-19.

Kemudian Marta menyampaikan, “Dalam hal ini meskipun calon penumpang yang melakukan rapid test antigen ini dinyatakan negatif, saya harap seluruh masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak aman minimal 1 meter.”

Lebih lanjut, Marta mengatakan bahwa pemeriksaan rapid test antigen ini dilaksanakan dengan melibatkan para petugas medis yang akan bersiaga di pintu masuk utama terminal. “Pertama-tama, para pemudik dan penumpang bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) wajib melalui pemeriksaan suhu tubuh ketika masuk terminal, kemudian mendaftar dengan menunjukan KTP kepada petugas, setelah itu baru dipersilakan untuk menjalani pemeriksaan rapid test antigen.”





**M**enteri Perhubungan Budi Karya Sumadi resmi menutup Pos Koordinasi (Posko) Tingkat Nasional Angkutan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 yang digelar di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Menhub menyampaikan hasil pemantauan penyelenggaraan Angkutan Nataru selama Posko berlangsung dari 18 Desember 2020 s.d 4 Januari 2021.

“Pada tahun ini terjadi penurunan jumlah penumpang angkutan di semua moda transportasi. Hal ini memang secara sistematis kita kehendaki. Di satu sisi memang banyak masyarakat yang tidak bepergian dan pulang ke kampung, dan kami juga sudah sampaikan imbauan kepada masyarakat untuk tetap di rumah. Hal ini sesuai arahan dari Bapak Presiden untuk mengawal ketat protokol kesehatan di masa libur Nataru,” jelas Menhub saat menutup Posko Nataru secara virtual, Selasa (5/1).

Berdasarkan data yang dihimpun dari Posko Nataru dari tanggal 18 Desember 2020 s.d. 4 Januari 2021 (H-7 s.d. H+9), terjadi penurunan jumlah penumpang jika dibandingkan dengan



Penutupan Posko Angkutan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta (5/1/2021). Foto: HMS DJPD/WBW

# MENHUB EVALUASI ANGKUTAN NATARU 2020/2021

**Seluruh pemangku kepentingan perlu melakukan evaluasi bersama agar penyelenggaraan angkutan Nataru tahun depan dapat berjalan lebih baik lagi.**

penyelenggaraan Angkutan Nataru Tahun lalu dengan periode yang sama, yakni sebagai berikut :

Pada angkutan bus, terdapat penurunan jumlah penumpang

sebanyak 59,87% yaitu dari 2.127.971 penumpang menjadi 853.970 penumpang.

Pada angkutan penyeberangan, terdapat penurunan jumlah

penumpang sebanyak 47,87% yaitu dari 3.063.561 penumpang menjadi 1.596.915 penumpang.

Pada angkutan udara, terdapat penurunan jumlah penumpang sebanyak 42,30% dari 3.602.821 penumpang menjadi 2.078.764 penumpang.

Pada angkutan laut, terdapat penurunan jumlah penumpang sebanyak 62,80% dari 1.380.422 penumpang menjadi 513.503 penumpang.

Pada angkutan kereta api, terdapat penurunan jumlah penumpang sebanyak 83,83% dari 3.495.773 penumpang menjadi 565.414 penumpang.

“Penurunan jumlah penumpang ini bukan berarti prestasi dari sektor transportasi menurun, tetapi ini

merupakan bentuk kesadaran dari masyarakat untuk tidak bepergian dan tetap menjaga protokol kesehatan. Kami mengapresiasi kesadaran dari masyarakat,” ungkap Menhub.

Lebih lanjut Menhub menyampaikan, untuk mencegah penularan Covid-19 di sektor transportasi, Kemenhub telah menindaklanjuti Surat Edaran dari Satgas Penanganan Covid-19 dengan memberlakukan sejumlah aturan yang ketat terkait protokol kesehatan seperti, kewajiban melakukan *Rapid Test Antigen* maupun PCR Test di beberapa daerah tujuan, serta melakukan pengecekan *Rapid Tes Antigen* secara acak di simpul-simpul transportasi.

“Kami bersama *stakeholder* transportasi telah melakukan

pengawasan persyaratan *Rapid Test Antigen* secara intensif di sektor udara dan kereta api, serta secara acak kami lakukan juga pengetesan *Rapid Test Antigen* di darat dan laut,” ujar Menhub.

Menhub juga menyampaikan apresiasi kepada Korlantas Polri yang berupaya menjaga kelancaran arus lalu lintas dengan melakukan rekayasa lalu lintas seperti *system one way, contraflow* di sejumlah ruas tol. Menhub juga mengapresiasi penurunan jumlah angka kecelakaan lalu lintas yang signifikan pada angkutan Nataru tahun ini.

Kemudian Menhub juga menyampaikan apresiasi, kepada seluruh petugas dari jajaran Kemenhub serta dari seluruh *stakeholder* yang telah melaksanakan tugas pengawasan, pemantauan, dan sosialisasi dengan baik seperti dari : Kemenkes, Kominfo, BMKG, KNKT, Basarnas, TNI, Polri, Dinas Perhubungan di seluruh Indonesia, Jasa Marga, Jasa Raharja, Operator Transportasi, Organisasi kemasyarakatan, dan instansi terkait lainnya, yang telah bersama-sama mengawal kelancaran penyelenggaraan Angkutan Nataru kali ini.

Menhub berpesan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi bersama agar penyelenggaraan sektor transportasi dapat berjalan lebih baik lagi kedepannya.

“Kita telah berhasil menyelesaikan tugas yang tidak ringan, dimana tahun 2020 ini tantangannya luar biasa. Karena kita tidak hanya bertugas memastikan keselamatan dan keamanan transportasi, tetapi juga aspek kesehatan, untuk memastikan penerapan protokol kesehatan berjalan dengan baik dan konsisten. Kami akan melakukan evaluasi agar penyelenggaraan angkutan Nataru tahun depan lebih baik lagi,” tutur Menhub.(\*)



# APRESIASI BAGI OPERATOR DAN PENGEMUDI BERPRESTASI

**Penganugerahan Wahana Adhigana dan Pemilihan Abdi Yasa Terbaik merupakan wujud apresiasi dan stimulus untuk menciptakan pelayanan angkutan umum yang selamat, aman, dan nyaman.**

Sebagai wujud apresiasi Pemerintah kepada pengemudi angkutan orang dan barang serta para operator sebagai pelaku usaha transportasi yang memiliki peran vital dalam peningkatan keselamatan transportasi jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan pada Senin (14/12) kembali menyelenggarakan acara Penganugerahan Wahana Adhigana dan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Nasional Tahun 2020 di Hotel Pullman, Jakarta.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi dalam sambutannya mengatakan, “Perlu diketahui penyelenggaraan kegiatan penganugerahan Abdi Yasa terbaik nasional ini memang dilaksanakan setiap tahunnya, pada dasarnya bertujuan untuk menyejajarkan insan pengemudi angkutan umum dengan insan pembangunan lainnya agar dapat mengubah sikap serta perilaku pengemudi menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab sekaligus mempersiapkan pengemudi angkutan orang dan barang yang profesional dan berkualitas.”

Dalam kesempatan ini Dirjen Budi menegaskan bahwa pengemudi adalah sebuah profesi, seorang pengemudi juga harus memiliki

kemampuan secara teknis mengendarai kendaraan. Namun yang paling penting selain kemampuan secara teknis juga perlunya meningkatkan kualitas maupun perilaku para pengemudi agar para pengemudi bangga dengan profesinya.

Di sisi lain bersamaan dengan penganugerahan Abdi Yasa, Kemenhub juga memberikan penganugerahan Wahana Adhigana kepada para operator angkutan orang maupun barang sebagai bentuk apresiasi serta mendorong semangat untuk menciptakan penyelenggaraan pelayanan angkutan yang aman, selamat, tertib, sehat, bersih, dan humanis.

“Melalui kegiatan penganugerahan ini, kami berkomitmen untuk mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas jalan sebagai bagian aktualitas Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan mengikutsertakan pengemudi dan operator angkutan yang berkualitas,” terang Dirjen Budi.

Sementara itu, Direktur Angkutan Jalan, Ahmad Yani dalam laporannya mengatakan, “Penghargaan Wahana Adhigana Tahun 2020 ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi Kementerian

Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kepada perusahaan angkutan umum yang telah memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat.”

Ada pun dalam mekanisme penilaian pemilihan Wahana Adhigana tahun 2020 ini, tim penilai menilai dari aspek administrasi, teknis, operasional, kepengusahaan, dan sumber daya manusia. “Dari jumlah keseluruhan sebanyak 20 orang pengemudi angkutan barang, 24 orang pengemudi angkutan orang, 11 perusahaan angkutan barang yang dibagi menjadi 3 kategori yaitu perusahaan kecil, perusahaan sedang, dan perusahaan besar, perusahaan angkutan orang yang terdiri dari 65 perusahaan AKAP ekonomi dan non ekonomi, serta 67 perusahaan pariwisata yang dibagi menjadi 3 kategori yaitu perusahaan kecil, perusahaan sedang dan perusahaan besar,” jelas Yani.

Lebih lanjut lagi, Ahmad Yani menambahkan dalam proses penganugerahan ini turut serta

para penilai dari instansi lainnya yakni KORLANTAS POLRI, KNKT, Jasa Raharja, dan pakar transportasi.

Dengan adanya acara ini, Dirjen Budi juga berharap agar ke depannya pelayanan angkutan umum di Indonesia menjadi lebih

baik dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga semakin banyak pengguna kendaraan pribadi yang beralih ke angkutan umum. (\*)

## Pemenang pemilihan Adhigana Tingkat Nasional Tahun 2020 (Perusahaan Angkutan Orang Terbaik)

| KATEGORI | RANK | EKONOMI                      | NON EKONOMI                        | PARIWISATA                     |
|----------|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| BESAR    | 1    | PT SINAR JAYA MEGAH LANGGENG | PT ROSALIA INDAH TRANSPORT         | HIBA UTAMA                     |
|          | 2    | PT SELAMAT SUGENG RAHAYU     | PT PAHALA KENCANA                  | PT WEHA TRANSPORTASI INDONESIA |
|          | 3    | PT EKA MIRA PRIMA SENTOSA    | PT SAN PUTRA SEJAHTERA             | PT BIG BIRD PUSAKA             |
| SEDANG   | 1    | PT BIMA SUCI JAYA AGUNG      | DAMRI CAB PURWOREJO                | BILLZ NUSANTARA SANGKARA       |
|          | 2    | PT BINTANG UTARA 1968        | PT GUNUNG HARTA TRANSPORT SOLUTION | SURYA PUTRA                    |
|          | 3    | PT RAJA PERDANA INTI         | PT PUSPA JAYA TRANSPORT            | KUPU-KUPU AYU                  |
| KECIL    | 1    | PT BINTANG UTARA PUTRA       | PT MEDALI MAS TRANSPORTATION       | PT TEGUH MUDA ABADI            |
|          | 2    | PT PASAMAN TRANSPORT EXPRESS | PT ANUGERAH KARYA UTAMI GEMILANG   | PT TRAVELA LINKAR SEJAHTERA    |
|          | 3    | PT MAJU LUHUR NAGKO PUSAKO   | PT KARYA SETIAWAN EKATAMA          | PUTRA MAS TRANS                |



Penyerahan Penghargaan Wahana Adhi Gana dan Pemilihan Abdi Yasa Terbaik Tahun 2020 di Hotel Pullman, Jakarta (14/12/2020). Foto: HMS DJPD/ABA

## Pemenang pemilihan Abdi Yasa Tingkat Nasional Tahun 2020

**Juara I**  
Nama : Dedy Agus Riyanto  
PT/PO : -  
Provinsi : Jawa Timur  
Nilai : 80.83%

**Juara II**  
Nama : Nundang Permana  
PT/PO : Damri Pontianak  
Provinsi : Kalimantan Barat  
Nilai : 80.19%

**Juara III**  
Nama : Arisa Franki  
PT/PO : -  
Provinsi : Riau  
Nilai : 78.04%



**P**elabuhan Penyeberangan Merak dan Bakauheni merupakan sepasang pelabuhan komersil yang menghubungkan pulau Jawa dan Sumatera. Sebagai lintas penyeberangan yang berada di kawasan pusat perekonomian nasional tentunya diperlukan dukungan infrastruktur. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, mengatakan, “Beroperasinya Dermaga IV Merak - Bakauheni merupakan solusi agar kegiatan mobilisasi barang maupun penumpang antara pulau Jawa dan Sumatera semakin lancar.” Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya ketika meresmikan Dermaga IV Merak - Bakauheni di Pelabuhan Penyeberangan Merak, Banten (Senin, 12/10/2020).

“Pembangunan Dermaga IV Pelabuhan Penyeberangan Merak - Bakauheni merupakan peningkatan dari dermaga yang sudah ada sebelumnya,” kata Dirjen Budi. “Dengan peningkatan yang telah dilakukan, dermaga IV dapat melayani kapal - kapal penyeberangan dengan kapasitas 6.000 - 10.000 GRT (Gross Tonnage),” lanjutnya.

Dirinya mengungkapkan bahwa saat ini terjadi kerusakan Dermaga V Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, dimana secara teknis akan sangat membahayakan keselamatan pelayaran apabila tetap dioperasikan. Oleh karena itu kesiapan Dermaga IV diperlukan untuk menjamin kelancaran layanan penyeberangan antar pulau ini.

Peran pelabuhan sangat vital dalam perekonomian nasional dan daerah, untuk menjamin kelancaran, keamanan, ketertiban dan keselamatan berlayar maka pemeliharaan fasilitas pelabuhan mutlak dilaksanakan. Hal ini juga yang harus dilaksanakan PT. ASDP selaku Operator Pelabuhan. Pemeriksaan fasilitas pelabuhan



# PERESMIAN DERMAGA IV MERAK & BAKAUHENI

**Beroperasinya Dermaga IV Merak & Bakauheni merupakan solusi agar kegiatan mobilisasi barang maupun penumpang antara pulau Jawa dan Sumatera semakin lancar.**

secara rutin merupakan *tools* untuk dapat melaksanakan langkah tindak lanjut dalam melaksanakan pemeliharaan berkala. Dengan langkah ini diharapkan tidak akan terjadi kerusakan yang bersifat mayor dan gagal fungsi pada fasilitas pelabuhan.

Menurut Dirjen Budi, selain terjaminnya keselamatan

pelayaran tantangan berikutnya adalah peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa terkait dengan kepastian waktu dan pemenuhan standar pelayanan minimal. Dengan bertambahnya dermaga akan bertambah pula frekuensi keberangkatan maupun kedatangan kapal setiap harinya. “Di Pelabuhan Penyeberangan Merak terdapat keterbatasan alur keluar masuk kendaraan,”

Peresmian Dermaga IV Merak dan Bakauheni di Pelabuhan Penyeberangan Merak, Banten (12/10/2020). Foto: HMS DJPD/ABA

kata Dirjen Budi. Dirinya menuturkan bahwa kondisi ini harus diantisipasi dengan pola operasi dan pengaturan jadwal yang optimal serta peningkatan kinerja angkutan penyeberangan. “Selanjutnya agar dilaksanakan kajian pola pengaturan alur keluar-masuk kapal termasuk didalamnya pengaturan posisi kapal labuh atau anchor,” ujarnya.

Dirjen Budi juga menekankan bahwa dengan pemberlakuan tiket terpadu di lintas penyeberangan Merak - Bakauheni, maka pengguna jasa harus mendapat pelayanan yang sama pada seluruh kapal yang beroperasi di lintas penyeberangan Merak - Bakauheni. “Untuk

mewujudkan ini butuh komitmen bersama seluruh *stakeholder* penyelenggaraan angkutan penyeberangan,” katanya.

Sementara itu Ira Puspawati, Direktur Utama PT. ASDP mengatakan bahwa dengan adanya Dermaga IV Merak Bakauheni maka lintas penyeberangan Merak - Bakauheni yang tadinya 140 trip, kini menjadi 160 trip per hari. Ira mengatakan pembangunan sepasang dermaga baru ini menelan biaya 379 milyar rupiah. Pekerjaan pembangunan Dermaga IV Merak - Bakauheni dilaksanakan oleh PT. PP (Persero), Tbk, dalam waktu satu tahun.

**Spesifikasi Teknis**  
Dermaga IV Merak dapat melayani kapal penyeberangan dengan kapasitas 6.000 - 10.000 GRT; tipe dermaga: *breasting dolphin*; pola sandar: buritan; panjang dermaga: 120m; kedalaman: 8m.

Dermaga IV Bakauheni dapat melayani kapal penyeberangan dengan kapasitas 6.000 - 10.000 GRT; tipe dermaga: *quay wall*; pola sandar: haluan; panjang dermaga: 150m; kedalaman: 9m.

Turut hadir dalam acara peresmian tersebut Walikota Cilegon Edi Ariadi, Kapolda Banten Fiandar, Direktur Operasi 2 PT PP (Persero) Tbk M Toha Fauzi, perwakilan Gapasdap, dan INFA.(\*)



Sebuah kapal ferry bersandar di Dermaga IV Merak, Banten. Foto: PT ASDP



Tampak atas Dermaga IV Merak, Banten. Foto: PT ASDP



Sebuah kapal ferry bersandar di Dermaga IV Bakauheni, Lampung. Foto: PT ASDP



Setelah memenuhi persyaratan dari Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, menyatakan rute Ketapang, Banyuwangi menuju Lembar, Lombok resmi beroperasi untuk melakukan layanan penyeberangan jarak jauh perdananya. Hal tersebut disampaikan saat melakukan *Launching* Lintas Ketapang-Lembar di Banyuwangi pada Sabtu (26/12). Lintasan baru ini pun merupakan rute penyeberangan jarak jauh ketiga setelah Surabaya-Lembar dan Jakarta-Surabaya yang dimaksudkan untuk mengurai kemacetan di Bali.

Lebih lanjut Ia menyampaikan bahwa untuk lintas ini sudah tersedia 7 kapal dari 7 operator yang sebagian besar berdomisili di Pelabuhan Lembar dan sudah siap untuk dilakukan pemberangkatan perdana di lintas baru ini, antara lain KMP Jambo X, KMP Liputan XII, KMP Portlink VII, KMP Dharma Ferry VIII, KMP Munic VII, KMP Parama Kalyani, dan KMP Swarna Cakra. Dengan kapal tersebut, jarak sejauh 125 mil dapat ditempuh dengan sailing time 12,5 jam, waktu pelayanan 3 jam. Per hari ada 8 trip, dengan jadwal tetap dan teratur. Dengan demikian, pemanfaatan waktu dan harga pun menjadi lebih efisien.

Dirjen Budi berharap, “Setelah dilakukan pengoperasian lintas Ketapang-Lembar ini dapat mendukung pembangunan daerah sekitar Ketapang dan Lembar dengan memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru serta mendukung pembangunan nasional secara keseluruhan, mendukung pertumbuhan dan pelayanan sektor lainnya seperti pariwisata di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), serta memberikan *multiplier effect* pada perekonomian di Jawa Timur dan NTB.”

# PELAYARAN PERDANA KETAPANG - LEMBAR

**Pengoperasian lintas penyeberangan Ketapang-Lembar ini dapat mendukung pembangunan daerah sekitar dengan memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru serta mendukung pembangunan nasional secara keseluruhan, serta mendukung pertumbuhan dan pelayanan sektor lainnya seperti pariwisata.**

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspawati, mengatakan, “Pihak ASDP mendukung program Pemerintah dalam memajukan sektor pariwisata, khususnya Pemprov Bali melalui peningkatan layanan angkutan *ferry* jarak jauh Ketapang-Lembar ini. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan KM 308 Tahun 2020 Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Antara Ketapang-Lembar, sebagai wujud dukungan terhadap kebijakan Gubernur Bali untuk mengurai kepadatan lalu lintas di Gilimanuk- Denpasar.”

Adapun besaran tarif terpadu yang telah ditetapkan oleh berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 309 Tahun 2020 tentang Tarif Ketapang-Lembar, yaitu penumpang kelas ekonomi dewasa dikenakan tarif Rp 105,800 sementara untuk bayi Rp 12,600. Sementara kendaraan dipisahkan sesuai golongannya menjadi:

Golongan 1 Rp 115,890  
Golongan 2 Rp 212,000  
Golongan 3 Rp 352,710



Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi meninjau KMP Dharma Ferry VIII yang akan melakukan pelayaran perdana lintas Ketapang - Lembar (26/12/2020). Foto: HMS DJPD/WBW



KMP Dharma Ferry VIII di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur (26/12/2020). Foto: HMS DJPD/WBW

Golongan 4 Penumpang Rp 1,083,690  
Golongan 4 Barang Rp 1,042,510  
Golongan 5 Penumpang Rp 1,992,935  
Golongan 5 Barang Rp 1,870,815  
Golongan 6 Penumpang Rp 2,952,710  
Golongan 6 Barang Rp 2,937,470  
Golongan 7 Rp 3,872,770  
Golongan 8 Rp 5,212,110  
Golongan 9 Rp 7,515,710

Ira melanjutkan, “Saat ini, masyarakat yang akan melakukan perjalanan Ketapang-Lembar

dapat membeli tiket *goshow* di Terminal Sri Tanjung, Banyuwangi dan melakukan pembayaran secara *cashless* dengan menggunakan kartu uang elektronik antara lain Brizzi (BRI), e-Money (Mandiri), TapCash (BNI), Flazz (BCA) dan juga dapat menggunakan transfer rekening BRI. Dengan demikian pengguna jasa akan semakin mudah, lancar dan nyaman saat membeli tiket ferry.”

Selain itu, ada pula hal yang harus diperhatikan dalam proses

operasional lintas penyeberangan ini, yaitu memberikan pelayanan prima dengan menjaga ketepatan jadwal keberangkatan dan sandar kapal, menyediakan koneksi serta jaringan internet yang stabil untuk kelancaran sistem tiket online, serta memfungsikan portal dan jembatan timbang untuk mencegah kendaraan *Over Dimension Over Loading* (ODOL). “Saya kembali menekankan dan meminta kerja sama dari semua pihak untuk memberantas ODOL, karena sangat besar peluang untuk terjadi kecelakaan. Kendaraan yang kelebihan muatan atau bahkan sumbu dipanjangkan, itu tidak hanya membahayakan keselamatan jiwa manusia, namun dapat merusak fasilitas pelabuhan juga,” pungkas Dirjen Budi. (\*)



Peresmian Pelayaran Perdana Lintasan Ketapang-Lembar, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi (26/12/2020). Foto: HMS DJPD/WBW



**M**enteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak investor dan pebisnis besar, menengah dan UMKM untuk memanfaatkan peluang ini. Hal tersebut disampaikan secara virtual dari Kantor Kementerian Perhubungan, ketika membuka acara *Investor Gathering New Terminal Experience* di Terminal Mangkang, Semarang, Selasa (1/12).

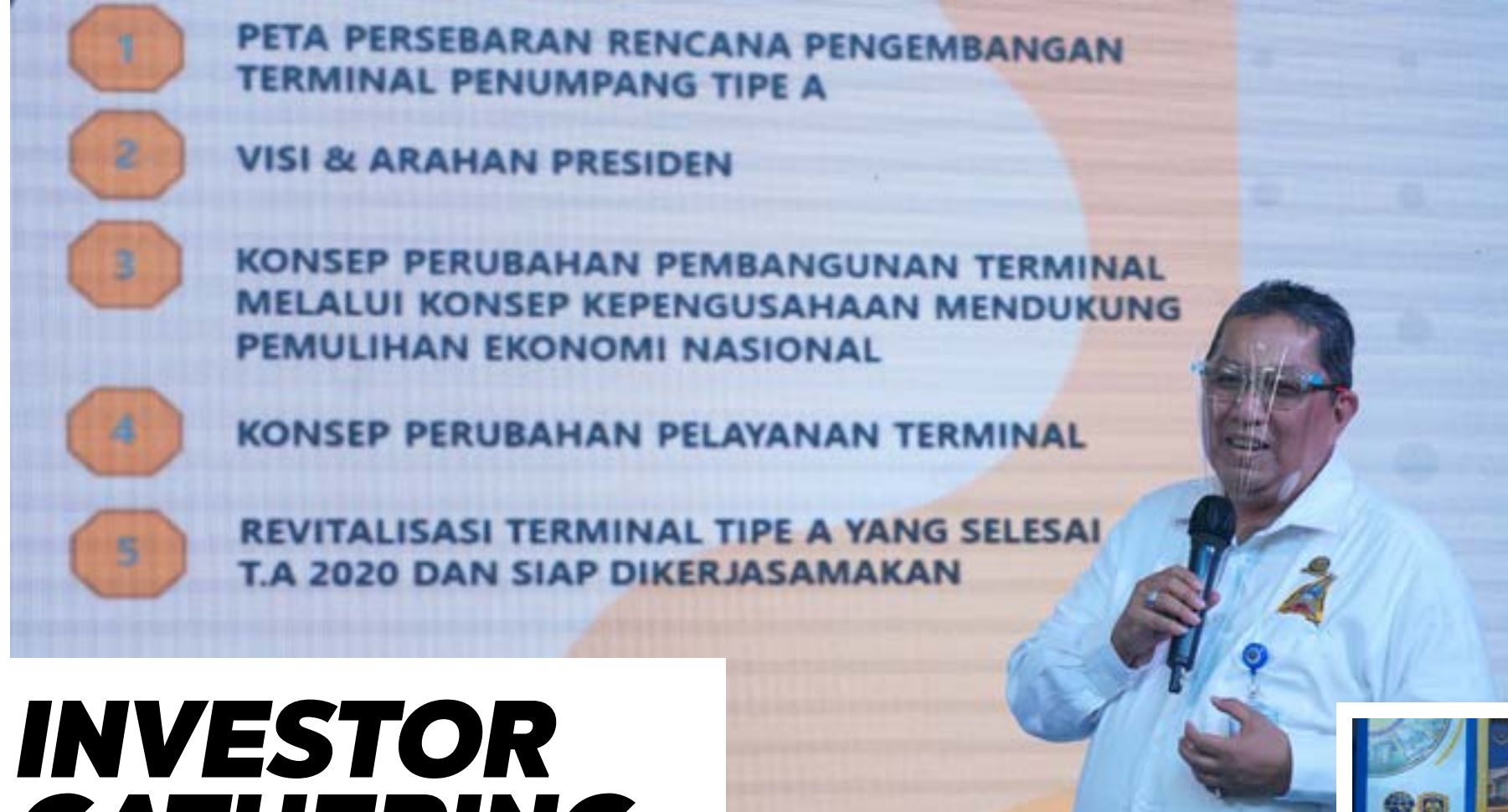
“Bapak Presiden berulang kali mengajak dunia usaha untuk melakukan investasi di berbagai sektor agar dapat menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada sektor UMKM,” kata Menhub.

Terminal adalah ikon suatu daerah yang juga sebagai tempat pertemuan antar moda, antar jurusan dan orang yang jumlahnya ribuan. “Jadi silahkan manfaatkan acara *Investor Gathering* ini untuk berinvestasi,” lanjutnya.

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, “Dengan mengusung konsep *New Terminal New Experience*, hadirnya terminal modern ini dapat menciptakan bangkitan baru, sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Kementerian Perhubungan terus berupaya meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan serta meningkatkan kualitas pelayanan melalui pembangunan dan diantaranya Revitalisasi Terminal Penumpang.

Sebagai salah satu perwujudan percepatan pembangunan infrastruktur dibidang transportasi darat, Kementerian Perhubungan saat ini sedang melakukan program Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A untuk Tahun Anggaran 2020 berjumlah 34 Terminal yang dibiayai dengan APBN rupiah murni dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).



Direktur Prasarana Transportasi Jalan Risal Wasal menyampaikan paparan pada kegiatan Investor Gathering di Terminal Bus Mangkang, Semarang (1/12/2020). Foto: HMS DJPD/CAS

# INVESTOR GATHERING ENAM TERMINAL

**Enam Terminal Penumpang Tipe A yang ditawarkan adalah Terminal Anak Air di Padang, Terminal Entrop di Jayapura Terminal Guntur Melati di Garut, Terminal Bulupitu di Purwokerto, Terminal Mangkang di Semarang, dan Terminal Tirtonadi di Solo.**

Demi mendorong partisipasi sektor swasta dan UMKM untuk bekerjasama dalam penyediaan dan penyelenggaraan infrastruktur transportasi yang dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat, diusunglah konsep *New Terminal New Experience* melalui optimalisasi layanan terminal dengan pola kepengusahaan mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo untuk

memberikan perhatian khusus hal-hal yang berkaitan dengan pembukaan lapangan kerja dan mendorong usaha mikro, kecil, menengah dan besar untuk mulai bergerak.

Untuk menjadikan Terminal sebagai pendukung pemulihan dan penggerak ekonomi nasional, maka dilakukan transformasi di Terminal yang meliputi, pola pembangunan berupa TOD/*mixed use*; tatakelola yang modern; membangun system operasi berbasis digital; membangun SDM yang professional;

menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih; menciptakan budaya mutu dan hospitality pelayanan publik yang harus dilakukan inovasi-inovasi baru secara berkelanjutan sehingga terdapat hasil lompatan perubahan secara signifikan.

“Besar harapan saya kegiatan Investor Gathering yang mengundang investor yang berasal dari BUMN, asosiasi, perusahaan swasta di bidang konstruksi, IT, Manajemen Gedung, ritel dan perhotelan, UMKM, PO Bus, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dapat berinvestasi pada terminal yang telah direvitalisasi, khususnya pada 6 (enam) terminal yang pemerintah tawarkan,” kata Budi. Sesditjen Perhubungan Darat, Marta Hadisarwono mengatakan, di waktu yang lalu banyak kita lihat kondisi terminal yang tidak terawat, rusak dan kumuh, bahkan sampai kehilangan fungsinya sebagai terminal.



1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi menyampaikan arahan secara virtual; 2. Sesditjen Perhubungan Darat Marta Hardisarwono (kiri) ketika memberikan keterangan pers di Terminal Mangkang, Semarang; 3. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengikuti kegiatan Investor Gathering New Terminal Experience secara virtual (1/12/2020). Foto: HMS DJPD/CAS

Dengan melakukan revitalisasi dan modernisasi di 34 terminal penumpang di sejumlah provinsi kita ingin mengubah citra itu. “Terminal akan kita ubah konsepnya, bukan hanya sebagai tempat naik turunnya penumpang, tapi juga sebagai kawasan bisnis baru,” kata Marta.

Sementara itu Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Mohamad Risal Wasal, dalam laporannya mengatakan, Investor Gathering ini diikuti lebih dari 200 pengusaha dari sejumlah kota yang hadir langsung ataupun melalui aplikasi tatap muka virtual dan media sosial.

Di Terminal Mangkang juga disiapkan sejumlah meja bagi calon investor yang berminat melakukan investasi di enam Terminal Penumpang, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan.

“Silahkan para calon investor menanyakan terkait sektor apa saja yang dibuka untuk investasi, bentuk kerjasama yang diinginkan, berapa lahan yang disiapkan dan nilainya. Telah siap teman-teman dari Kementerian Keuangan akan melakukan pendampingan,” pungkasnya.(\*)



Emisi gas buang dari kendaraan bermotor yang cukup tinggi di Indonesia, khususnya kota besar seperti Jakarta menjadi isu tersendiri ketika mulai mempengaruhi lingkungan hidup dan menjadi salah satu faktor terbesar polusi udara. Untuk meminimalisir dampak emisi gas buang tersebut, maka diperlukan sistem pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor yang mumpuni. Pada Rabu (18/11) pagi, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melakukan Peresmian Laboratorium Uji Emisi *Heavy Duty* R49 di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi.

“Dengan peresmian fasilitas ini sebagai bukti Ditjen Hubdat sangat serius menjamin produk kendaraan bermotor di Indonesia untuk diakui seluruh dunia. Bagaimana kontribusi kendaraan bermotor menyumbang polusi udara, kita lihat sebelum pandemi masyarakat selalu mengeluh, semua diakibatkan gas buang kendaraan bermotor. Ada 2 kecenderungan yang menyebabkan polusi yaitu semakin meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor atau semakin tergantungnya masyarakat menggunakan kendaraan bermotor dan gas buang yang tidak terjamin kualitasnya. Kalau kita berpikir panjang untuk kepentingan anak cucu kita dan lingkungan hidup, maka kita harus menjamin kualitas udara semakin baik. Kita ingin berkontribusi menjamin sebagian besar gas buang kendaraan bermotor agar terjaga kualitasnya,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi.

Menurut Dirjen Budi, emisi kendaran bermotor mengandung gas karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>), karbon monoksida (CO), hidro carbon (HC), dan partikel lain yang berdampak negatif pada manusia ataupun lingkungan bila melebihi



Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi menandatangani prasasti peresmian Laboratorium Uji Emisi *Heavy Duty* R49 di BPLJSKB Bekasi (18/11/2020). Foto: HMS DJPD/ABA

# LABORATORIUM UJI EMISI HEAVY DUTY R49

**Laboratorium Pengujian Emisi Gas Buang standar UN R49 untuk kendaraan *heavy duty* di BPLJSKB memiliki peralatan yang mampu melakukan pengujian emisi gas buang terhadap engine dengan kapasitas daya mesin mencapai 400 kW dengan standar uji emisi sampai dengan EURO IV.**

ambang konsentrasi tertentu. “Bagaimana kita mendidik dan menyadarkan masyarakat kita untuk mulai mengurangi polusi dengan membatasi penggunaan kendaraan pribadi ini tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan. Di dalam regulasi internasional, terdapat beberapa peraturan yang bertujuan untuk pengendalian ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor,” urai Dirjen Budi.

Melalui kesempatan tersebut, Direktur Sarana Transportasi Jalan, Pandu Yunianto menjabarkan 4 hal yang menjadi tujuan dari peresmian Laboratorium Uji Emisi *Heavy Duty* R49 BPLJSKB Bekasi yakni:

1. Menjadikan pengujian tipe yang memenuhi standar keselamatan dan sesuai dengan perkembangan regulasi Kendaraan Bermotor baik nasional maupun internasional;
2. Mewujudkan salah satu dari 5 (Lima) pilar keselamatan yaitu terkait pilar ketiga dibidang kendaraan yang berkeselamatan (*safer vehicle*);
3. Mewujudkan Tag Line Pengujian Tipe yaitu MANTAP (Modern, Akuntabel, No-gratifikasi, Transparan, Akurat, Profesional);
4. Menjadikan pengujian tipe

yang bertaraf internasional dan siap menghadapi ASEAN MRA.

Pandu menjelaskan bahwa ASEAN MRA adalah keberterimaan dan pengakuan hasil dari proses pengujian tipe dalam rangka homologasi dan/atau sertifikasi kendaraan bermotor di negara ASEAN yang mengacu pada standar *UN Regulation*.

“Artinya apabila kendaraan bermotor telah diuji di salah satu negara regional ASEAN, maka untuk kepentingan ekspor tidak perlu dilakukan pengujian kembali di negara tujuan ekspor pada regional ASEAN. Dengan demikian, BPLJSKB dituntut untuk segera melakukan pembenahan maupun peningkatan pelayanan pada aspek sarana maupun prasarana yang meliputi peralatan uji dan fasilitas pendukung serta SDM yang berkompeten,” ucap Pandu.

Pandu juga menerangkan jika Pengujian Emisi merupakan salah satu bagian penting dari pengujian tipe di BPLJSKB yang merupakan upaya dalam pengendalian lingkungan terhadap pencemaran udara yang berasal dari banyaknya kendaraan bermotor, dimana pada saat ini Kementerian LHK telah menetapkan Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Kategori M, N dan O agar memenuhi standar Euro IV.

“Hingga saat ini, pengujian emisi gas buang standar UN R49 untuk kendaraan *heavy duty* dilakukan dengan metode kerjasama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan melakukan pengujian Emisi menggunakan fasilitas di BT2MP Serpong atau dengan dilakukan *witness test* di fasilitas laboratorium mancanegara yang terakreditasi,” tambah Pandu.

Dengan adanya fasilitas pengujian emisi gas buang kendaraan



Peninjauan Laboratorium Uji Emisi *Heavy Duty* R49 di BPLJSKB Bekasi (18/11/2020). Foto: HMS DJPD/ABA

bermotor dengan metode standar UN R49 untuk kendaraan *heavy duty* yang telah dimiliki BPLJSKB, maka diharapkan dapat menjawab kendala pengujian emisi metode R49 dengan memberikan pelayanan langsung pengujian emisi R49 kepada masyarakat baik untuk produk kendaraan bermotor yang akan dipasarkan di dalam negeri sekaligus dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekspor ke luar negeri di bidang industri otomotif.

**Hasil pembangunan peralatan pengujian emisi *Heavy Duty* R49 sudah siap melayani masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan khususnya dari segi emisi gas buang.**

**Yusuf Nugroho  
Kepala BPLJSKB**

Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, Yusuf Nugroho dalam laporannya pada acara peresmian tersebut menyatakan sebagai upaya dalam mengimplementasikan harmonisasi regulasi di bidang automotif melalui forum ASEAN MRA (*Mutual Recognition Arrangement*) dimana salah satu regulasi UN ECE yang disepakati untuk diselaraskan di regional ASEAN adalah regulasi emisi dengan metode UN R49 untuk kendaraan kategori M1, M2, M3, N2, N3, O3, dan O4 dengan GVW (*Gross Vehicle Weight*) >3.5 ton.

BPLJSKB Pada Tahun 2017 - 2018 telah menyelesaikan

pembangunan Laboratorium Uji Emisi *Heavy Duty* R49 meliputi:

1. Gedung Fasilitas Pengujian Emisi *Heavy Duty* R49 yang terdiri dari *Facility Room, Utility Room, Test Cell, Control Room, dan Gas Room*;
2. Peralatan Pengujian yang terdiri dari *Chassis Dynamometer, Gas Kalibrasi, Weighing Chamber, Gas Analyzer, Komputer Kontrol, Berikut Fasilitas Pendukung Berupa Air Dryer, Compressor, Fuel Tank, Chiller, Air Reservoir Tank, Air Handling Unit, Dan Peralatan Safety*.

“Untuk menjamin pengoperasian peralatan uji, kami telah melakukan beberapa kali uji coba dan juga telah melakukan kegiatan pelatihan pengoperasian peralatan uji. Hasil pembangunan peralatan pengujian emisi *Heavy Duty* R49 sudah siap melayani masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan khususnya dari segi emisi gas buang,” tambah Yusuf.

Sementara itu, dalam pernyataannya, Dirjen Budi mengatakan, “Saat ini kita hadir di sini bersama-sama menyaksikan salah satu bentuk komitmen pemerintah hadir, khususnya Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan kendaraan berkeselamatan dan ramah lingkungan dengan membangun Fasilitas Uji Emisi *Heavy Duty* R49 di BPLJSKB yang kita banggakan ini. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan dapat mendorong industri otomotif dalam negeri untuk selalu melakukan inovasi menurunkan angka emisi gas buang dari kendaraan bermotor dan meningkatkan daya saing produksi serta pangsa pasar tidak hanya di Kawasan Asia Tenggara tapi lebih besar lagi di kancah internasional,” pungkasnya.”





Sesditjen Perhubungan Darat, Marta Hardisarwono bersama Kabag Hukum dan Humas, Endy Irawan; Kasubdit Dalops, Adjie Panatagama; serta Anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi Ma'Azat, pada acara Rakernis PPNS LLAJ 2020 di Pekanbaru, Riau (25/11/2020). Foto: HMS DJPD/APB

## RAKERNIS PPNS BIDANG LLAJ 2020

**Demi meningkatkan transportasi jalan yang berkeselamatan, Ditjen Perhubungan Darat menggelar Rapat Kerja Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) LLAJ Tahun 2020.**

Dalam upaya meningkatkan keselamatan transportasi jalan yang berkeselamatan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat yang tertib dan selamat melalui penegakan hukum yang moderen, transparan, dan berintegritas salah satunya dengan meningkatkan kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ). Demikian disampaikan Sesditjen Perhubungan Darat, Marta Hardisarwono dalam acara Rapat Kerja Teknis PPNS Bidang LLAJ Tahun 2020 di Hotel Novotel, Riau, pada Rabu (25/11).

Menurut Marta, hal ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam mendukung peran PPNS dalam menjawab tantangan yang semakin

dinamis di lapangan. "Seperti permasalahan strategis yang menyangkut restrukturisasi bidang hukum khususnya terkait implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dimana diperlukannya paradigma baru dalam memandang penyelenggaraan transportasi darat," jelas Marta.

Berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur ketentuan mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang memerlukan kejelasan penerapan di lapangan melalui pengaturan dalam peraturan pemerintah.

"Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan pada dasarnya bertujuan untuk mendorong terciptanya kepatuhan dan

budaya berlalu lintas, memastikan terpenuhinya persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor, memastikan terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan kendaraan bermotor angkutan umum, serta mendukung pengungkapan perkara tindak pidana," terang Marta.

Lanjutnya, Marta berharap dengan diadakannya Rakernis ini dapat meningkatkan kinerja PPNS dalam rangka menyamakan visi, misi dan gerak serta langkah dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 80 peserta yang berasal dari para PPNS bidang LLAJ di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia serta dihadiri oleh Anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi Ma'Azat, Kepala Bagian Hukum dan Humas Ditjen Perhubungan Darat, Endy Irawan, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Indra Putrayana, dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang, Bambang Hartanto.(\*)

TSDP

### ANTISIPASI CUACA EKSTREM, DIRJEN HUBDAT IMBAU PETUGAS LASHING TRUK DI KAPAL PENYEBERANGAN



Munculnya fenomena La Nina perlu diwaspadai terlebih mengenai perubahan cuaca ekstrem. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengimbau masyarakat dan petugas di lapangan khususnya kepada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di seluruh wilayah Indonesia untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrem terutama saat periode

libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah pada 28 Oktober- 1 November.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi menyatakan bahwa salah satu upaya untuk menjaga keselamatan saat berlayar yakni dengan memastikan setiap kendaraan yang akan menyeberang menggunakan Kapal Penyeberangan/ Ro-Ro melakukan proses *Lashing*. *Lashing* atau mengikat kendaraan di kapal penyeberangan untuk menghindari benturan kendaraan ketika ada ombak besar.

"Bagi para petugas di lapangan saya minta untuk memastikan bahwa kendaraan yang ada di dalam kapal Ro-Ro nantinya harus diikat atau *lashing* khususnya truk. Proses *lashing* ini harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan Pada Kapal Angkutan Penyeberangan. Selain itu sebagai SOP untuk meminimalisir kejadian ken-

daraan terjungkir ke laut saat perjalanan," jelas Dirjen Budi.

Dalam PM 30/2016 pasal 4, tertulis: Setiap kendaraan wajib diikat selama dalam pelayaran. Untuk pengikatan kendaraan (*lashing*) wajib dilakukan pada kendaraan yang terletak di barisan depan (haluan), tengah (*midship*) dan belakang (buritan). Kendaraan yang tidak dilakukan pengikatan wajib dilakukan klem pada roda kendaraan.

la menekankan pentingnya proses *lashing* ini terlebih mengingat cuaca yang juga mulai memasuki musim hujan di sejumlah daerah. "Tidak bisa dihindari lagi bahwa belakangan ini kondisi laut juga mungkin sedang mengalami ombak besar maupun hujan deras sehingga cukup menantang saat melakukan pelayaran. Oleh karena itu, seluruh petugas maupun kru harus memperhatikan faktor keselamatan penumpang, kendaraan, maupun seluruh muatan yang ada di dalam kapal," katanya lebih lanjut.(\*)

TSDP

### JELANG NATARU 2020/2021, KEMENHUB-ASDP IMBAU MASYARAKAT OPTIMALKAN FERIZY



Sesuai arahan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, masyarakat diimbau untuk mengoptimalkan penggunaan Ferizy, sistem tiket online angkutan penyeberangan. Selain mudah dan praktis, transaksi tiket online melalui Ferizy pun membantu mengurangi risiko penyebaran Covid-19 di pelabuhan dan kapal penyeberangan. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, dalam acara Media Gathering Kesiapan dan Persiapan Layanan Angkutan Natal dan Tahun Baru di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Senin (14/12).

Dirjen Budi melanjutkan, melalui aplikasi Ferizy, masyarakat dapat melakukan pemesanan dan pembayaran tiket kapal penyeberangan secara online sehingga tidak perlu memesan langsung

di pelabuhan. Hal ini dapat mengurangi penumpukan antrean pembelian tiket di loket, mencegah kepadatan calon penumpang, dan meminimalkan interaksi fisik.

Sistem tiket online Ferizy saat ini telah dapat digunakan di Pelabuhan Penyeberangan Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk. Sementara, untuk sistem *E-Ticketing* dapat dilakukan di Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Padangbai, Kayangan, dan Pototano. Selain itu juga di Pelabuhan Ajibata dan Ambarita di Danau Toba. Calon penumpang angkutan penyeberangan diimbau untuk mempersiapkan diri dengan menyelesaikan pesanan tiket setidaknya 4 jam sebelum keberangkatan untuk memperlancar arus kendaraan yang akan masuk pelabuhan dan mencetak *boarding pass* 2 jam sebelum jadwal keberangkatan.

Terkait aspek pelayanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bekerja sama dengan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagai operator untuk meningkatkan sosialisasi tentang pembelian tiket online kepada masyarakat. Selain itu PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) juga melakukan *bypass* penjualan tiket dan data *manifest* di loket penjualan tiket jika terjadi stagnasi di area depan gerbang tol, dan memperbaiki prasarana pelabuhan yang mengalami kerusakan.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspawati, menyampaikan, "Secara umum, (diprediksikan) terjadi penurunan *traffic* sebesar 19% di Pelabuhan Merak dan 35% di Pelabuhan Ketapang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Situasi ini tentunya disebabkan oleh pandemi Covid-19." Walaupun demikian, pihak ASDP telah menyiapkan kapasitas lebih 36% dari yang dibutuhkan di Pelabuhan Merak-Bakauheni dan kapasitas lebih 29% pada Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk.

Kemudian, Ira juga menjabarkan prediksi hari puncak Angkutan Nataru 2020/2021 di mana akan terjadi puncak arus mudik pada Rabu, 23 Desember 2020 (H-2) dan puncak arus balik pada Sabtu, 2 Januari 2021 (H+8). Sementara itu, di tahun ini produksi Angkutan Nataru 2020/2021 diprediksikan jumlah trip sebanyak 15.704, jumlah penumpang sebesar 2.178.305, kendaraan roda 2 sebanyak 152.920, dan kendaraan roda 4 sebanyak 449.464.

"Secara keseluruhan, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) siap untuk melaksanakan Kegiatan Posko Angkutan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Besar harapan saya agar masyarakat bisa memaksimalkan Ferizy dan selalu menerapkan protokol kesehatan di pelabuhan dan kapal penyeberangan," tutup Ira.(\*)



## PRASARANA

## PROGRAM PADAT KARYA DI TERMINAL CILACAP, DITJEN HUBDAT IKUTSERTAKAN MASYARAKAT SETEMPAT



Sebagai upaya membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggelar Program Padat Karya di beberapa lokasi. Kali ini, program Padat Karya dilaksanakan di Terminal Bus Tipe A “Bangga Mbangun Desa” Cilacap, Jawa Tengah (13/10).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, dalam sambutannya, mengatakan bahwa kegiatan Padat Karya ini sebagai upaya menjalankan instruksi pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan masyarakat lokal, dan juga mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubun-

gan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat Karya di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat mengikutsertakan pekerja setempat.

“Pak Presiden mendorong semua kementerian ataupun pemerintah menggunakan anggarannya untuk dapat langsung menyalurkan kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat Covid-19,” kata Dirjen Budi. Sejak merembaknya Pandemi Covid-19, dampak terhadap sektor ekonomi sangatlah besar, dimana banyak karyawan atau pun pekerja yang dirumahkan sementara yang menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat, untuk itu program Padat Karya diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat.

Kegiatan padat karya tersebut melibatkan kurang lebih 250 warga yang berasal dari Kabupaten Cilacap. Pekerjaan yang dilakukan pada Terminal Bus Tipe A Cilacap ini antara lain, pembersihan area terminal dan pekerjaan pengecatan kantin terminal.

Program Padat Karya Ditjen Perhubungan Darat dilaksanakan pada 33 provinsi, 250 kabupaten/kota, dan 400an desa, dengan anggaran sebesar 46 miliar. Kegiatan padat karya ini juga merupakan upaya Direktorat Jenderal Perhubungan

Darat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal, sehingga lebih berperan dalam mendidik masyarakat untuk lebih produktif bekerja dalam pembangunan.

Total Luas lahan terminal 9.855 m<sup>2</sup>, jumlah kendaraan bus perhari sebanyak 150 bus/hari, melayani keberangkatan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dengan tujuan Jakarta (Terminal Pulo Gebang, terminal Kampung Rambutan), Tangerang (Terminal Poris Plawad), Bogor (Terminal Baranangsiang), Cirebon (Terminal Harjamukti), Surabaya (Terminal Purabaya), Malang (Terminal Arjosari).

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Hj. Novita Wijayanti, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengungkapkan apresiasinya atas kegiatan padat karya di Terminal Cilacap. “Program padat karya ini sangat bermanfaat untuk masyarakat dan meningkatkan perekonomian sesuai dengan tujuan pemerintah,” kata Novita. “Terimakasih atas semua yang bersinergi dalam kegiatan ini, semoga bermanfaat untuk Kabupaten Cilacap, serta langsung dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut hadir pula Plt. Kepala BPTD X Jateng-DIY, Taufiq Hidayat, Bupati Cilacap, H. Totto Suwanto Pamuji, DPRD Kabupaten Cilacap, serta jajaran Forkompinda Kabupaten Cilacap.\*)

Bermotor, Direktorat Sarana Transportasi Jalan, mengatakan, “Hingga bulan September 2020 ada 190 Kabupaten/Kota di 26 provinsi yang sudah menerapkan BLU-e.” Dirinya berharap Kabupaten/Kota yang belum menggunakan BLU-e dapat segera mengurus ataupun mempersiapkan.

BLU-e digagas untuk menggantikan buku uji. Selama ini pendistribusian buku uji tidak terkendali, karena selain mudah dipalsukan, produksi buku uji di berbagai daerah tidak seragam. “Contohnya sampul buku uji, karena banyak vendor, maka warna birunya tidak sama, ada yang biru gelap, biru donker, ada yang birunya mendekati ungu,” kata Avi.

BLU-e terdiri dari kartu pintar (*smart-card*), sertifikat, dan stiker hologram yang ditempelkan di kaca depan sisi kiri dari sebelah dalam kendaraan. Stiker hologram memudahkan pengawasan kendaraan di jalan dan mempercepat proses administrasi pengujian.\*)

“Untuk mempermudah distribusi dan penerbitan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor agar cepat, efisien, terintegrasi, dan transparan, perlu diterapkan sistem penerbitan bukti lulus uji secara elektronik yang dikenal dengan nama BLU-e,” kata Kabag Hukum dan Humas, Ditjen Perhubungan Darat, Kemenhub, Endy Irawan ketika membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perhubungan Darat di Grand Karlita, Purwokerto (12/11).

Endy, yang hadir mewakili Sesditjen Perhubungan Darat, menuturkan, “Dari sisi regulasi, telah diterbitkan Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor KP.1743/AJ.502/DRJD/2020 tentang Pedoman Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Secara Elektronik.” Menurutnya dengan terbitnya Perdirjen ini dapat menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk menerapkan BLU-e pada UPUBKB masing-masing.

Senada dengan hal tersebut, Avi Mukti Amin, Kasubdit Uji Berkala Kendaraan

## SARANA

## KEMENHUB DORONG DISHUB DAERAH GUNAKAN BLU-e PADA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR



Uji berkala kendaraan bermotor merupakan pengujian yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan. Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) pada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.

## UMUM

## KEMENHUB SERAHKAN DONASI 2 MILIAR UNTUK AKSES AIR BERSIH DAN 100 UNIT SEPEDA DI NTT



Kementerian Perhubungan memberikan bantuan donasi berupa uang senilai Rp2 Miliar dan 100 unit sepeda bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Pemberian donasi ini ditujukan untuk pengadaan akses air bersih di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Imran Rasyid yang hadir di Desa Tedakisa, Nagekeo menyatakan bahwa donasi yang terkumpul

dari seluruh insan perhubungan di bawah naungan Kemenhub.

“Donasi insan transportasi untuk air bersih di Nusa Tenggara Timur ini diberikan dalam donasi bentuknya uang dan telah ditransfer langsung melalui Yayasan PLAN International Indonesia serta 100 unit sepeda dari Kemenhub untuk masyarakat di sini,” demikian disampaikan Imran pada Jumat (30/10).

Imran menyampaikan harapannya agar bantuan dari Kemenhub tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat serta semakin mempermudah masyarakat untuk memperoleh akses air bersih yang dekat di desanya. “Intinya tentu semoga bantuan yang diberikan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kami dari Kemenhub, mewakili Bapak Menteri Perhubungan dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat menyampaikan rasa bangga kami dapat berpartisipasi dalam acara ini. Kami ucapkan selamat dan mohon diterima dengan baik donasi dari Kemenhub melalui kerjasama dengan Yayasan PLAN International Indonesia. Kami senang dapat tiba di sini,” kata Imran.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Nagekeo, Yohanes Don Bosco menyampaikan terima kasih atas kunjungan maupun donasi yang dikumpulkan oleh Kementerian Perhubungan.

“Kita berkumpul hari ini sesuai dengan tagline *Equality*. Terima kasih untuk yang hari ini dalam wujud fisik maupun doa yang memungkinkan acara ini terjadi. Pada saat ini tuntutan konektivitas yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi terutama di sektor darat karena amat dibutuhkan untuk pergerakan barang dan jasa. Bantuan ini memang rahmat bagi masyarakat Tadekeo khususnya desa Tedakisa. Saya mengucapkan terima kasih karena melalui Anda semua mimpi kami dapat terwujud,” kata Yohanes.

Dalam penyerahan donasi ini, turut hadir Staf Khusus Menteri Perhubungan, Adita Irawati, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Nusa Tenggara Timur, Tito Gesit Utiarto, Executive Director Plan Indonesia, Dini Widiastuti, dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nagekeo, Efraim Ch. Muga.\*)

## TSDP

## DUKUNG KEMUDAHAN PERIZINAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN, DITJEN HUBDAT LUNCURKAN AIR SDP



Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (TSDP) melakukan peluncuran Aplikasi Informasi Registrasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (AIR SDP). Peluncuran aplikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, bersama para stakeholder, dilakukan guna mendukung kemudahan pengusaha dan kemudahan untuk mendapatkan izin operasional ASDP.

“Dulu, mengurus perizinan harus melalui proses yang panjang, birokratis, berbelit-belit. Dokumen fisik yang diperlukan pun

sangat banyak dan bertumpuk sehingga mengakibatkan antrean panjang dan memerlukan waktu yang lama. Kini, dengan adanya AIR SDP, kita dapat memangkas birokrasi, menggunakan waktu dan biaya dengan lebih efisien, lebih transparan, dan juga terukur,” ujar Dirjen Budi dalam sambutannya di acara Sosialisasi AIR SDP pada Selasa (22/12) di Hotel Pullman Thamrin, Jakarta.

Lebih lanjut, Ia pun menjelaskan bahwa AIR SDP menyempurnakan sistem perizinan online yang sudah ada sebelumnya. AIR SDP sudah terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS), sehingga operator maupun pelaku usaha dapat memperoleh perizinan dalam waktu yang singkat, tanpa perlu menggunakan dokumen fisik karena seluruh data telah terekam di dalam OSS. “Dengan demikian, pelaku usaha dapat mengajukan perizinan, mengupload dokumen persyaratan yang diperlukan, memantau proses secara *real time*, serta tidak terbatas ruang dan waktu,” lanjutnya.

Dalam kata lain, AIR SDP memungkinkan pelaku usaha untuk mengurus perizinan menjadi cepat, mudah, dan efisien. Laporan pemeriksaan kapal di lintasan dapat langsung dikirimkan saat pada saat pemeriksaan sehingga tidak

diperlukan dokumen fisik yang banyak, birokrasi lebih cepat, dan tentunya bisa diakses di mana saja.

“Dengan demikian, saya sangat mengharapkan operator angkutan dapat memanfaatkan dan memaksimalkan aplikasi ini sebaik mungkin. Selain itu diharapkan pula partisipasi aktif operator angkutan penyeberangan untuk memberikan feedback atau saran untuk pengembangan AIR SDP agar menjadi aplikasi perizinan yang ramah dan andal,” kata Dirjen Budi.

Setelah itu, Kepala Sub Direktorat Angkutan SDP, Arif Muljanto, turut menyampaikan bahwa AIR SDP dikembangkan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan memperoleh persetujuan pengoperasian dan sertifikasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) angkutan SDP.

“AIR SDP hadir dengan sejumlah manfaat yang tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, namun juga mempermudah Direktorat TSDP dalam mengelola proses perizinan usaha, mengefisienkan proses dan waktu pengelolaan, membantu TSDP dalam melakukan adaptasi dan transformasi kerja dalam era digital, serta tentunya dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan iklim investasi di bidang SDP,” jelas Arif dalam paparannya.\*)



LALIN

## PANTAUAN LIBUR NATARU MENHUB VIA HELI : ARUS LALIN TOL JAPEK DAN JALUR PUNCAK TERPANTAU LANCAR



Arus lalu lintas di tol Jakarta-Cikampek dan jalur Puncak pada Rabu (24/12) terpantau lancar. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai melakukan pantauan via Helikopter, di Ciawi, Jawa Barat.

Menhub menyampaikan, lancarnya arus lalu lintas terjadi kemungkinan karena banyak masyarakat yang memilih liburan di rumah. Ia pun mengapresiasi masyarakat yang memilih tidak bepergian di masa pandemi ini.

“Berdasarkan survey yang dilakukan Kemenhub, sebanyak 70 persen masyarakat lebih memilih libur di rumah. Saya ucapkan terima kasih karena selain menghindari resiko penyebaran covid, juga membantu pemerintah tidak memenuhi jalan,” kata Menhub.

Lebih lanjut, Menhub Budi mengapresiasi kepolisian yang secara intensif melakukan *random check rapid* antigen kepada masyarakat yang melakukan perjalanan di beberapa titik sampling seperti di Terminal Kampung Rambutan, Jalur Puncak arah Ciawi dan Godog, serta *rest area* tol arah timur.

“Sektor transportasi darat agak susah dalam pengawasannya sehingga saya apresiasi pihak Korlantas Polri yang telah melakukan *random check* (rapid antigen),” kata Menhub.

Menhub mengimbau agar masyarakat yang merasa kurang enak badan untuk mengurungkan bepergian dan tetap tinggal di rumah.

Pada akhir pantauan, Menhub juga memberikan bingkisan dan masker kepada para petugas yang bertugas mengamankan arus lalu lintas di pos polisi Gadog, Ciawi.(\*)



Truk pengangkut gula pasir seberat 35 ton dinyatakan kelebihan muatan dan diberlakukan proses transfer muatan di area Terminal Terpadu Merak (16/12). Foto: HMS DJPD

## TRANSFER MUATAN, JURUS KEMENHUB ATASI TRUK OVERLOAD

Sebagai terobosan untuk menangani permasalahan truk ODOL (*Over Dimension Overload*), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, menerapkan transfer muatan. “Selain fokus terhadap normalisasi kendaraan, Pemerintah juga ingin memberikan langkah alternatif untuk mengatasi ODOL yaitu dengan melakukan transfer muatan,” kata Direktur Lalu Lintas Jalan, Sigit Irfansyah ketika membuka acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kemampuan Penyidikan PPNS Tahun 2020 yang dilaksanakan di Hotel Novotel Semarang pada Rabu (21/10).

Sigit menegaskan bahwa permasalahan truk ODOL perlu segera ditangani. Sebab Pemerintah harus mengeluarkan anggaran hingga puluhan triliun rupiah per tahun untuk melakukan normalisasi kendaraan yang melanggar ketentuan dimensi. Adapun cara lainnya yang Pemerintah tawarkan yakni berupa transfer muatan. “Transfer muatan ini bukan kegiatan baru, sebelumnya sudah dilakukan di beberapa daerah,” kata Sigit.

Sigit menjabarkan, penindakan normalisasi kendaraan itu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pemotongan kendaraan secara sukarela atau melalui penegakan hukum. “Apabila diperhatikan sangat jarang sekali perusahaan yang secara sukarela melakukan normalisasi kendaraannya yang melebihi batas dimensi dan muatan, kebanyakan cenderung menunggu pada saat penegakan hukum saja. Hal ini sangat membebani pemerintah,” jelas Sigit. Lain halnya dengan transfer muatan. Transfer muatan menjadi keharusan bagi kendaraan yang kedapatan overload, biaya transfer muatan akan dibebankan kepada operator. Menurut Sigit, dengan

membebankan biaya transfer muatan kepada operator, akan menimbulkan efek jera bagi para pelanggar. Selain permasalahan ODOL, dalam kesempatan tersebut Sigit juga mengungkapkan pentingnya mendukung peran Sumber Daya Manusia (SDM) atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk meningkatkan kualitas dalam menjawab tantangan yang semakin dinamis di lapangan.

### Perketat Pengawasan Truk ODOL

Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Banten melakukan kegiatan penegakan hukum terhadap truk *Over Dimension Over Loading* (ODOL) di *rest area* KM 68 Tol Merak arah Jakarta.

Penegakan hukum terhadap ODOL dipimpin langsung oleh Kepala BPTD Wilayah VIII Banten, Endi Suprasetio dengan dukungan personil dari Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Polda Banten, PJR Polda Banten, dan Dempom IV/4 Serang.

“Dari hasil pelaksanaan giat penegakan hukum pada Senin 14 Desember 2020 mulai pukul 15.00 hingga 23.00 WIB telah dilakukan penilangan oleh PPNS UPPKB sebanyak 11 kendaraan karena over load. Dari 11 kendaraan yang ditilang karena *over load*, malam itu juga segera dilakukan transfer muatan pada truk yang mengangkut batubara dan tanah,” jelas Endi.

“Truk ODOL berpotensi mengakibatkan kecelakaan, merusak jalan dan lingkungan yang dapat merugikan masyarakat banyak. Jadi penegakan hukum yang dilakukan secara periodik akan berjalan paralel dengan sosialisasi dan edukasi, bahwa mulai tahun 2023 tidak ada lagi truk ODOL,” jelas Endi.(\*)



◀ Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi dan pejabat terkait lainnya melakukan sosialisasi penggunaan sepeda yang berkeselamatan dalam acara Virtual Fun Bike di Jakarta (17/10/2020). Foto: HMS DJPD/ABA



◀ Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Kepala BPTJ Polana B. Pramesti, dan Kadishub DKI Syafrin Liputo meninjau Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta (29/10/2020) guna memastikan penerapan protokol kesehatan dalam masa libur panjang terlaksana dengan baik. Foto: HMS DJPD/ ABA



► Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi dan jajaran bersama Gubernur Maluku Murad Ismail, saat meresmikan operasional KMP Bahtera Nusantara 02 di Ambon, Maluku, Selasa (3/11/2020). Foto: HMS DJPD



◀ Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi melakukan pemotongan kendaraan truk yang over dimensi di kawasan Industri Kapal Indonesia, Makassar (4/10/2020). Foto: HMS DJPD



▲ Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Dirjen Perhubungan Darat, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan sejumlah pejabat terkait melakukan peletakan batu pertama pembangunan Revitalisasi Terminal Amplas, Medan (8/11/2020). Foto: HMS DJPD



▲ Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi meninjau lokasi kecelakaan di Tol Cipali (30/11/2020). Kecelakaan tersebut melibatkan truk ODOL dan travel gelap. Foto: HMS DJPD



◀ Sesditjen Perhubungan Darat Imran Rasyid bersama Kadishub Kota Surakarta Hari Prihatno, Kabag Hukum dan Humas Endy Irawan, Korsatpel Terminal Tirtonadi Joko Sutriyanto, dan Kasi TSDP BPTD Wilayah X Jateng-DIY, Didik Tri Margono pada saat kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perhubungan Darat di Solo (17/11/2020). Foto: HMS DJPD/CAS.





► Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi bersama Direktur Lalu Lintas Jalan Suharto, dan Kasubdit MRLL Rudi Irawan melakukan pantauan kondisi lalu lintas Cirebon-Cisarua-Ciawi-Cikopo menggunakan helikopter (3/1/2021). Foto: HMS DJPD/WBW



► Pengukuhan Marine Inspector, Syahbandar, dan Ahli Ukur Kapal di Tangerang (15/12/2020). Foto: HMS DJPD/AP



► Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Sekjen Kemenhub Djoko Sasono, dan Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi dalam Peluncuran Mobil Listrik untuk Kendaraan Dinas Kemenhub di Stasiun Gambir, Jakarta, (16/12/2020). Foto: HMS DJPD/ABA

